

**ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA PADA KETAHANAN PANGAN di ERA PANDEMI**  
(studi kasus Desa Simpang Empat,kecamatan Simpang Empat,Kabupaten Asahan  
Provinsi Sumatera Utara)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Program Ekonomi Pembangunan*



Oleh :

**Nama** : **NOVITA SARI BR SINULINGGA**  
**Npm** : **1705180002**  
**Program Studi** : **EKONOMI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**  
Unggul dalam Ilmu, Berprestasi dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : NOVITA SARI BR SINULINGGA  
NPM : 1705180002  
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA KETAHANAN PANGAN DI ERA PANDEMI (STUDI KASUS DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si)

**Penguji II**

(HADRIMAN KHAIR, S.P, M.Sc)

**Pembimbing**

(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

  
(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

**Sekretaris**

  
(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NOVITA SARI BR SINULINGGA

N.P.M : 1705180002

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Judul Skripsi : ANALISA EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA KETAHANAN PANGAN DI ERA PANDEMI (STUDI KASUS DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 8 September 2021

Pembimbing Skripsi

Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si

Assalamualaikum ma pa....

Terimakasih untuk segala yang sudah mama bapak berikan kekakak, tiada henti mama dan bapak berusaha memberikan yang terbaik untuk kakak.

Ma...mama adalah segalanya untuk kakak, wanita kuat lembut, penyabar dan penyayang. Terimakasih ma sudah hadir ditengah tengah kami dan memberikan kehangatan didalam rumah. Terimakasih sudah melahirkan kakak dan membesarkan kakak penuh cinta dan kasih sayang. Mengajarkan kakak bagaimana menjadi anak pertama yang kuat, menjadi kakak yang baik untuk adik-adiknya.

Paa...cinta pertama kakak dan segalanya.

Terimakasihya Bapak selalu menuruti apa yang kakak mau, bapak selalu memberikan yang terbaik untuk kakak. Tanpa jerih payah bapak gelar Sarjana Ekonomi ini tidak akan kakak dapatkan. Pa...beribu cinta telah kam berikan, membanting tulang mencari nafkah dikala panas terik, hujan badaipun bapak tempuh untuk kami. Kakak bangga dan merasa beruntung memiliki bapak seperti kam pa. Pa... sekarang anak pertama bapak sudah berhasil memperoleh gelar sarjananya. Allah begitu baik sudah menghadirkan mama dan bapak sebagai orang tua kakak. Berkat usaha dan doa mama dan bapak kakak dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan memperoleh gelar SE.

Sehat Selalu orang tuaku, kakak sayang mama dan bapak

## ABSTRAK

*Dalam Skripsi ini, penulis mengangkat judul "Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (studi kasus Desa Simpang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara) tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Ketahanan Pangan masyarakat di Desa Simpang Empat selama pandemi Covid-19, bahwa ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam dan bergizi untuk hidup sehat aktif, dan produktif serta berkelanjutan. Dan mengenai kemampuan setiap rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup. Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah untuk membangun dan memperkuat daerah – daerah dan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Di Era Pandemi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pemenuhan ketahanan pangan rumah tangga. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dengan teknik analisis deskriptif melalui hasil kuesioner. Dengan populasi yang digunakan adalah masyarakat di Desa Simpang Empat dengan penentuan sampel melalui accidental sampling menggunakan rumus slovin.*

**Kata Kunci :** Dana Desa, Ketahanan Pangan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

## KATA PENGANTAR



Asaalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, kesabaran, serta kekuatan dan tak lupa pula Shalawat bernadakan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: “Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (Studi Kasus Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)”, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penelitian skripsi ini penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh penulis, namun demikian penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas sehingga terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah membimbing penulis, baik moril, materil dan ide-ide pemikiran.

Skripsi ini dipersembahkan terkhusus kepada Ayahanda Muhammad Eddykin Sinulingga dan Ibunda NurAnita Br Tarigan yang telah memberikan do'a, spiritual, moral, dan materil yang tidak akan ternilai. Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
4. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Untuk Fikri,Henni,Ketry yang selalu membantu, mendukung dalam hal apapun saya mengucapkan banyak terima kasih.
7. Kepada seluruh Keluarga Kecil ( Adek Uty,Adek Myra,Abang Ekin) yang telah memberi support dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman jurusan saya yang telah memberi semangat dan motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar Ekonomi Pembangunan UMSU dari angkatan 2017 – 2020
10. Seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu demi satu.

Seluruh bantuan yang tidak ternilai harganya ini tidak dapat saya balas satu per satu, semoga Allah SWT membalasnya sebagai amal ibadah dan akan menjadi manfaat yang sangat besar bagi kita semua, Amin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2021 Penulis,

**Novita Sari Br Sinulingga**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	26
1.3 Batasan Masalah .....	27
1.4 Rumusan Masalah .....	27
1.5 Tujuan Penelitian .....	27
1.6 Manfaat Penelitian .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
2.1 Landasan Teori.....	29
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	29
2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi.....	43
2.1.3 Pendapatan Nasional.....	58
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah.....	62
2.2 Penelitian Terdahulu .....	71
2.3 Regulasi Pemerintah .....	73
2.4 Kerangka Konseptual.....	77

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>78</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	78
3.2 Definisi Operasional.....	78
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	79
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	79
3.5 Populasi dan Sampel.....	79
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	80
3.7 Teknik Analisis Data.....	80
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>82</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Asahan.....	82
4.1.1 Letak Geografis.....	84
4.1.2 Kondisi Iklim Dan Topografi .....	86
4.1.3 Kondisi Demografi.....	87
4.1.4 Kondisi Ekonomi.....	89
4.1.5 Kondisi Sosial Kabupaten Asahan.....	94
4.1.6 Perkembangan Dana Desa Kabupaten Asahan Sebelum Pandemi.....	96
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Simpang Empat.....	98
4.2.1 Letak Geografis.....	100
4.2.2 Kondisi Iklim Dan Topografi.....	100
4.2.3 Kondisi Demografi.....	101
4.2.4 Kondisi Sosial Ekonomi Desa Simpang Empat.....	102
4.3 Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan Rumah Tangga.....	101
4.3.1 Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan	

Rumah Tangga Desa Simpang Empat.....	101
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>114</b>
5.1 Kesimpulan.....	114
5.2 Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2016-2020.....	11
Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin Di Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020.....	19
Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020.....	24
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	71
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	78
Tabel 4.1 Nama,Luas Wilayah Perkecamatan Kabupaten Asahan.....	83
Tabel 4.2 Tinggi Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Asahan.....	86
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kecamatan Dikabupaten Asahan (jiwa) 2020.....	87
Tabel 4.4 PDRB Atas Dsar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha Di Kabupaten Asahan 2016-2020.....	90
Tabel 4.5 PDRB Atas Dsar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha Di Kabupaten Asahan 2017-2019.....	93
Tabel 4.6 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020.....	94
Tabel 4.7 Luas Menurut Desa di Kecamatan Simpang Empat.....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2012-2020.....	6
Gambar 1.2 Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Indonesia 2017-2020.....	7
Gambar 1.3 Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2020.....	9
Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2015-2020.....	10
Gambar 1.5 Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2018.....	16
Gambar 1.6 Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial Penangan Dampak Covid-19 Tahun 2020.....	17
Gambar 1.7 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Asahan Tahun 2019-2020.....	22
Gambar 1.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupten Asahan Tahun 2014-2019.....	23
Gambar 2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	64
Gambar 2.2 Kurva Peacock dan Wiesman.....	66
Gambar 2.3 Kurva Wagner,Solow,dan Mugrave.....	67
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Asahan.....	82
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Simpang Empat.....	99

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia, dan dapat menyerang siapapun dalam segala jenis usia. Virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pada 11 Maret 2020 lalu virus itu menyebar dengan cepat sehingga pada Januari 2020, virus itu mulai merambah ke-31 provinsi di China. *World Health Organization* (WHO) sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau yang juga disebut *corona virus disease 2019* (COVID-19). Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19.

Kasus infeksi juga ditemukan di luar China pertama kali pada 15 Januari 2020 di Thailand. Infeksi selanjutnya dengan cepat menyebar ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat. Meskipun menjadi negara dengan temuan kasus pertama di luar China, Thailand dinilai sigap membendung penyebaran. Berbeda dengan Thailand, Amerika justru semakin melonjak jauh jumlah kasus terinfeksi

covid-19, berdasarkan data jumlah kasus infeksi virus corona Amerika Serikat sebanyak 33.476.781 kasus (10/05/2021), dengan jumlah kasusu tersebut menjadikan Amerika sebagai negara dengan kasus tertinggi hingga saat ini. Kemudian pada bulan Maret, Eropa muncul sebagai episentrum virus corona. Terutama di negara Italia saat itu. Benua biru melaporkan setengah dari infeksi baru dunia untuk pertama kalinya pada 5 Maret, dan yang terburuk mendeteksi lebih dari 80 persen dari angka harian. Selama dua bulan terakhir, kematian dan tingkat infeksi telah melambat di Italia, dan awal bulan ini negara itu membuka kembali perbatasannya dan mengakhiri pembatasan perjalanan regional. Di saat semua negara di dunia mulai untuk bersahabat dengan virus covid-19 tersebut India mengemparkan dunia dengan klaster terbaru dari virus covid tersebut. Saat ini total kasus infeksi covid di India sebanyak 28,2 juta dengan jumlah kematian 4000 per harinya dan ini menjadikan India sebagai negara ke 2 dengan kasus infeksi covid tertingi.

Berdasarkan data dari *World Health Organization (WHO)* Dari 237 negara terdapat 224 negara ikut terinfeksi covid-19, 13 negara lainnya dinyatakan bersih terhadap kasus covid-19. Peringkat pertama negara yang terinfeksi kasus pandemi covid-19 per pebruari 2021 diduduki oleh negara Amerika Serikat dengan jumlah kasus 27.883.560 dan peringkat kedua diduduki oleh negara India 11.030,176 kasus dan Indonesia berada di peringkat 18 dari seluruh dunia dengan jumlah kasus 1.298.608. Berdasarkan wilayah peringkat pertama diduduki oleh negara - negara yang berada di benua Amerika dengan jumlah kasus sebanyak 49.700.102 kasus, pada benua Eropa jumlah kasus sebanyak 37.974.729 kasus, pada kawasan Asia yang terdiri 48 negara yaitu Indonesia ,Jepang, Uzbekistan,Hongkong,

India, dan yang lainnya memiliki banyak kasus covid sebesar 13.415.065 kasus, pada kawasan Mediterania Timur terdapat 6.266.689 kasus covid , Afrika 2.811.106 kasus, dan Pasifik Barat 1.594.530 kasus.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan keseluruhan wilayah sebesar 1,904,569  $km^2$  yang menjadikan Indonesia sebagai negara terluas di Asia Tenggara. Menurut hasil sensus kependudukan Indonesia yang dilakukan oleh badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2020, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke 4 yang memiliki populasi terpadat di dunia. Indonesia sendiri menjadi negara dengan jumlah kasus covid-19 tertinggi ke 18 di dunia dan jumlah kasus tertinggi pertama di Asia Tenggara dengan jumlah kasus sebanyak 1.314.634 kasus.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan keseluruhan wilayah sebesar 1,904,569  $km^2$  yang menjadikan Indonesia sebagai negara terluas di Asia Tenggara. Menurut hasil sensus kependudukan Indonesia yang dilakukan oleh badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2020, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke 4 yang memiliki populasi terpadat di dunia. Indonesia sendiri menjadi negara dengan jumlah kasus covid-19 tertinggi ke 18 di dunia dan jumlah kasus tertinggi pertama di Asia Tenggara dengan jumlah kasus sebanyak 1.314.634 kasus.

Salah satu dampak covid-19 dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dimana setiap negara mengalami penurunan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya, hal ini dirasakan langsung oleh seluruh negara baik negara maju maupun negara berkembang. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan *output* perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan *output* perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan, bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini berarti terdapatnya kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan

oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, dimana melaksanakan pembangunan yang baik harus mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu (undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan mengamankan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan tantangan mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa.

Konsep dan upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sudah dimulai sejak awal kemerdekaan, yang terus disempurnakan dari waktu ke waktu hingga Indonesia mampu berswasembada beras pada tahun 1984. Namun demikian, berkembang pesatnya penduduk beserta seluruh aktifitas sosial, ekonomi dan politik telah menimbulkan tantangan dan masalah yang sangat kompleks dan mempengaruhi upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Situasi krisis pangan yang dialami oleh berbagai bangsa termasuk Indonesia memberikan pelajaran bahwa ketahanan pangan harus diupayakan sebesar mungkin bertumbuh pada sumber daya nasional dengan keragaman antar Daerah, karena ketergantungan pada pangan impor menyebabkan kerentanan yang tinggi. “konsep ketahanan pangan mengandung tiga dimensi yang saling berkaitan yaitu:

1. Ketersediaan pangan

2. Aksebilitas masyarakat terhadap pangan
3. Stabilitas harga pangan

Apabila salah satu dari dimensi tersebut tidak terpenuhi, suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, jika akses individu untuk memenuhi kebutuhannya tidak merata, ketahanan pangan masih dikatakan rapuh”. Bustanul Arifin (2007;153). Ketahanan pangan memiliki sembilan indikator yaitu rasio warung,rasio toko,rasio rumah tangga tidak sejahtera,rasio rumah tangga tanpa arus listrik,rasio akses roda 4,rasio anak tidak sekolah,rasio rumah tangga tanpa air bersih,rasion jumlah tenaga kesehatan dan rasio fasilitas sanitasi.Terlihat dari grafik berikut bahwa ketahanan pangan di Indonesia mengalami penurunan.

**Gambar 1.1**

**Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2012-2020**



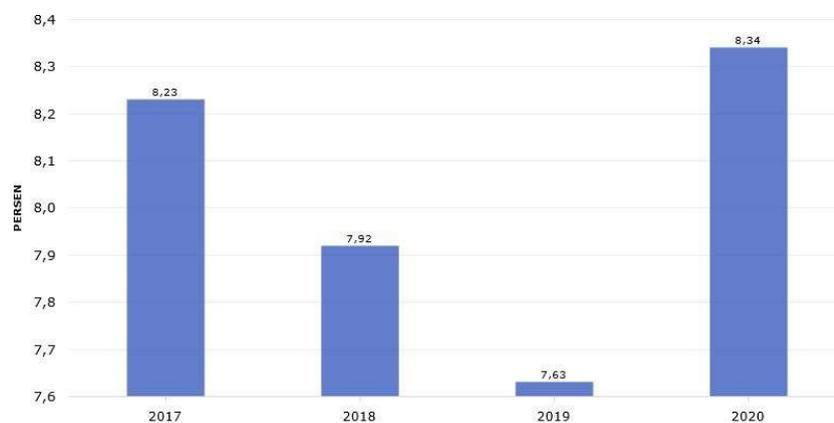
**Sumber:** badan pusat statistik (<https://www.bps.go.id/>)

Dari grafik ketahanan pangan Indonesia dari tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 Indeks Ketahanan Pangan Indonesia sebesar 54,8%, terjadi kenaikan

sebesar % yaitu 62,6% di tahun 2019. Pada tahun 2020 Indeks Ketahanan Pangan mengalami penurunan sebesar % yaitu menjadi 59,5%. Penurunan yang terjadi di tahun 2020 menyebabkan ketidakcukupan konsumsi pangan untuk masyarakat, dapat dilihat berdasarkan grafik dibawah ini.

**Gambar 1.2**

**Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Indonesia 2017-2020**



Katadata.co.id

databoks

Sumber: badan pusat statistik (<https://www.bps.go.id/>)

Berdasarkan grafik diatas ketidak cukupan pangan ditahun 2017

sebesar 8,23% mengalami penurunan sebesar 0,31% yaitu 7,92 pada tahun 2018 dan kembali mengalami penurunan drastis ditahun 2019 menjadi 7,63%. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan ketidak cukupan pangan sebesar 0,71% yaitu 8,34% hal ini diakibatkan pandemi covid-19. Ketersediaan bahan pangan pokok pada kondisi pandemi memegang peranan penting mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk. Pandemi covid-19 berpengaruh pada krisis pangan. Sampai saat ini Pemerintah berusaha berfokus menjaga pasokan bahan makanan pokok. Pilar pertama strategi ketahanan pangan berada di tangan petani sendiri. Indonesia hampir sepenuhnya bergantung pada produksi makanan pokok dalam negeri termasuk beras, jagung, dan singkong. Namun, pandemi COVID-19 merubah itu semua dengan terganggunya sistem logistik pangan karena aktivitas

terbatas selama pandemi, serta rantai pasok atau *supply chain* pangan sehingga masyarakat akan kehilangan akses pangan yang mengancam kehidupan mereka.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh setiap negara maupun daerah. Ukuran keberhasilan suatu negara maupun daerah dilihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ditandai dengan kenaikan pendapatan daerah yang dihasilkan dari meningkatnya hasil produksi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang melambat ditandai dengan menurunnya hasil produksi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan berbagai upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara optimal. Hal ini tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai peranan sebagai faktor produksi. Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,3%, adalah salah satu negara yang sedang berkembang sedang giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui pendapatan nasional yang ditunjukkan dengan besarnya nilai PDB (Produk Domestik Bruto). Berdasarkan dampak dari terjadinya pandemi perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%, dimana sebagian besar sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif dan hanya beberapa dari sector lapangan usaha tersebut yang memiliki pertumbuhan yang positif.

Gambar 1.3

### Pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2018-2020



Sumber: badan pusat statistik (<https://www.bps.go.id/>)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perekonomian indonesia tahn 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan, sebagian besar sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif. Sektor industri pengolahan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,93 persen , sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor mengalami kontraksi sebesar -3,72 persen, sektor konstruksi mengalami kontraksi sebesar -3,26 persen, sektor pertambangan dan pengalihan mengalami kontraksi sebesar -1,95 persen, sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup besar yaitu -15,04 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,44 persen; Jasa Lainnya sebesar 4,10 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94 persen; Real Estat sebesar 2,32 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,75 persen. Penurunan dan kenaikan pertumbuhan ekonomi ini terjadi dikarenakan selama masa krisis virus covid-19 diberlakukan nya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di seluruh Indonesia, dan hal ini mengharuskan seluruh masyarakat melakukan

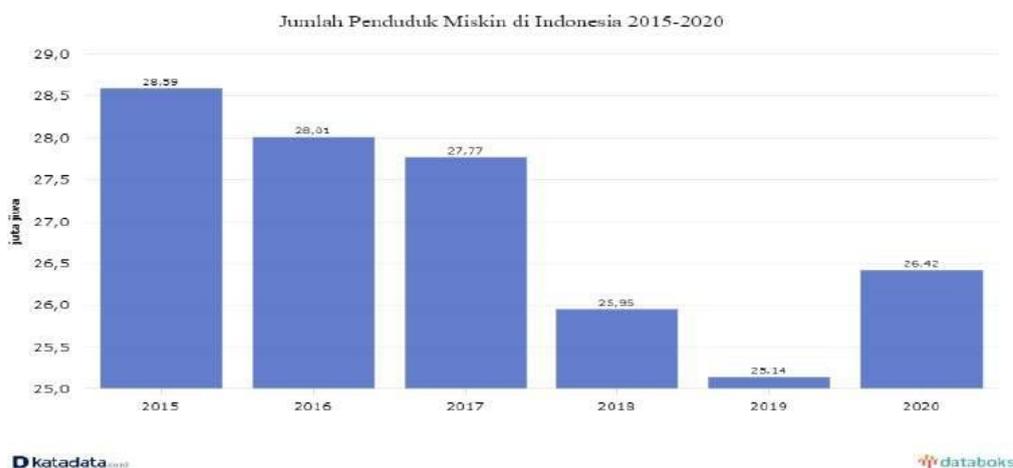
seluruh aktifitas dilakukan dirumah secara online atau daring atau yang biasa disebut dengan Work From Home (WFH).

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian orang di dunia. Negara miskin masih dihadapkan antara masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata sementara itu, banyak negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun, kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskin (Todaro dan smith 2006:231)

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya, namun masih terdapat sekitar 29,13 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun tahun 2012. Untuk melihat data kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dapat dilihat dari tabel berikut.

**Gambar 1.4**

**Jumlah Penduduk Miskin Indonesia tahun 2015-2020**



Sumber: badan pusat statistik (<https://www.bps.go.id/>)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai tahun 2020, jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 26,42 juta. Angka ini naik 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 25,14 juta. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah penduduk miskin Indonesia cenderung turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 28,59 juta, lalu pada tahun 2016 menjadi 28,01 juta. Pada tahun 2017 jumlahnya menjadi 27,77 juta dan pada tahun 2018 menjadi 25,95 juta.

Mengingat pentingnya peran manusia dalam proses pembangunan ekonomi, maka peningkatan sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama pemerintah. Peningkatan ini tidak hanya dilihat dari segi kuantitas saja melainkan jauh lebih penting dari segi kualitas. Kualitas hidup manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut United Nation Development Program (UNDP), indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

**Tabel 1.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2016-2020**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
IPM	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber: Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/>)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2020 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 nilai IPM Indonesia sebesar 70,18 dan di tahun 2017 sebesar 70,81 yang menyatakan adanya perubahan sebesar 0,63 Pada tahun 2018 mengalami kenaikan

sebesar 0,58 sehingga menjadi 71,39, pada tahun nilai indeks pembangunan manusia sebesar 71,92 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 0,53. Pada tahun 2020 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia sebesar 71,94. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*).
2. Pengetahuan (*knowledge*).
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator produk domestik bruto (PDB) perkapita.

Sejak tahun 2001, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2001 bertumpu pada alokasi pusat kepada daerah yang dikenal sebagai dana perimbangan. Selama hampir 10 (sepuluh) tahun berjalannya desentralisasi fiskal, telah dialokasikan secara signifikan dana perimbangan ke daerah, dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), baik yang berasal dari pajak maupun sumber daya alam.

Pada hakikatnya, Dana Perimbangan dapat ditujukan untuk menurunkan ketimpangan fiskal vertikal (atau ketimpangan antar tingkat pemerintahan), maupun horizontal (atau ketimpangan antar pemerintahan daerah). Dana transfer

dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, seperti telah dijelaskan sebelumnya, dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi yang didesentralisasikan. Sementara itu, dana transfer antar pemerintahan daerah dimungkinkan untuk mengakomodasi masalah eksternalitas, kerjasama antar daerah, bantuan dari daerah surplus ke daerah lainnya, serta mengakomodasi ketimpangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis transfer dari Pusat ke Daerah untuk tujuan khusus, sehingga dalam literatur keuangan negara dikategorikan dalam kategori bantuan spesifik, atau bantuan bersyarat (*tied, conditional, or categorical grant*). Sebenarnya terdapat dua jenis *specific grants*, yaitu *matching grants* dan *non-matching grants*. Dalam kasus *matching grants*, Daerah penerima harus ikut berkontribusi (menyediakan dana pendamping), sedangkan *non-matching grants* tidak mengharuskan Daerah penerima menyediakan kontribusi. Di Indonesia, Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggap sebagai *matching grants* karena menurut Ayat 1 Pasal 41 Undang-Undang (UU) 33/2004, Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. Meskipun demikian, menurut Ayat 3 dalam Pasal 41 yang sama, ada toleransi yang menyatakan bahwa Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping. Namun toleransi tersebut sekarang sulit terjadi karena pengertian kemampuan fiskal tertentu adalah jika total belanja pegawai Daerah penerima minimal sama dengan penerimaan umum APBD.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horisontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*).

Dana Desa dipisah dari dana Transfer ke Daerah. Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan untuk pertama kali Program Dana Desa pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 20,76 triliun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan

memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa dikeluarkan dengan fokus untuk meningkatkan pemerataan keuangan antar daerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah yang selama ini terjadi, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan di Desa. Dana Desa dinilai akan lebih diperkuat pemanfaatannya agar dapat memperluas pembangunan di desa, baik sarana maupun prasarana, dengan berbasis kinerja.

Berdasarkan data yang dihimpun BPS, jumlah desa tertinggal semakin berkurang, melewati target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, yakni 5.000 desa tertinggal. Mayoritas desa di Indonesia berstatus berkembang, yakni 55.369 (73,40%) dari jumlah desa di 2018 yang sebanyak 74.958 desa. Desa yang sekarang masih tertinggal kebanyakan terdapat di Indonesia bagian timur.

**Gambar 1.5**  
**Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2018**

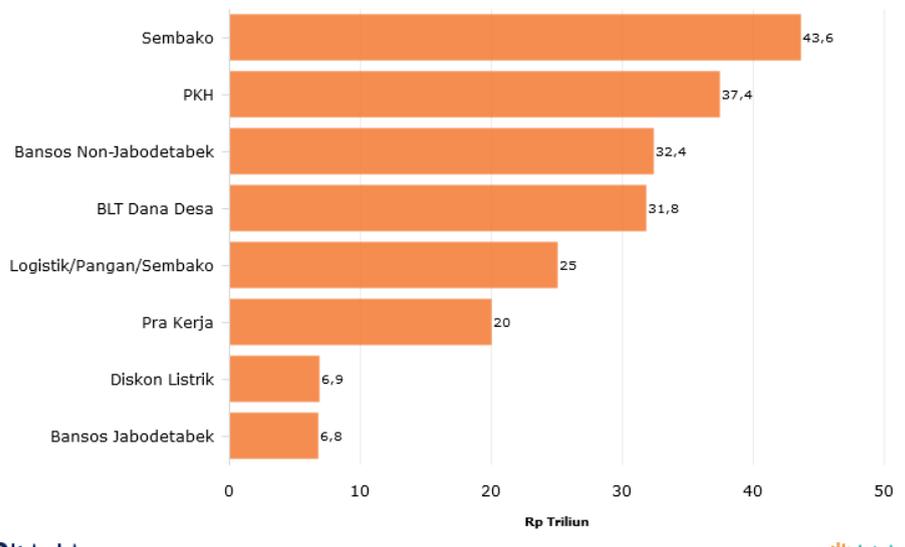


Sumber: Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Dana desa menjadi salah satu kebijakan di pemerintahan Jokowi – JK. Total Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp 187,75 triliun yang realisasi anggarannya rata-rata hampir mencapai 100%. Pada tahun 2017 dan 2018 Dana Desa dikeluarkan sebesar 8,5 % dari anggaran Transfer ke daerah. Dengan meningkatnya Dana Desa pada setiap tahun, diharapkan kualitas pembangunan desa juga bisa ditingkatkan baik infrastruktur desa maupun sumber daya manusianya.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan salah satu kegiatan pemberian bantuan langsung yang bersumber dari Dana Desa kepada penerima keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa (pasal 1 angka 18). Ketika perekonomian melemah akibat Covid-19 program BLT membantu untuk mendorong konsumsi masyarakat.

**Gambar 1.6**  
**Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial Penanganan Dampak Covid-19**  
**Tahun 2020**



Sumber: Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Berdasarkan gambar diatas Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial penanganan covid-19 tahun 2020 dengan pembagian sembako sebesar 43,6 triliun rupiah, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 37,4 Triliun Rupiah, bansos no-jabodetabek yaitu 32,4 Triulium Rupiah,pemerintah juga memberikan anggaran untuk logistik atau pangan sebesar 25 Triliun Rupiah, kartu prakerja 20 Triliun Rupiah, diskon listrik 6,9 Triliun Rupiah, dan untuk bansos jabodetabek 6,8 Triliun Rupiah, alokasi anggaran penanganan covid-19 melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar 31,8 Triliun Rupiah dimana anggaran ini disalurkan kepada masyarakat desa.

Adapun syarat penerima Bantuan Langsung Tunai ialah keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi syarat yaitu tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja,mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadanga ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup

selama tiga bulan kedepan, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id))

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berada pada posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional yang membawa keuntungan tersendiri dalam menyokong perekonomian daerahnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2016 sebesar Rp 628.394,16 milyar yang tergolong mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor pertanian sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai (21,65%). Selanjutnya sektor industri pengolahan (19,98%), sektor perdagangan (17,89%), sektor konstruksi (13,40%) dan sektor-sektor lain memberikan total kontribusi sebesar 27,08% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor tersebut menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (BPS Sumatera Utara).

**Grafik 1.1**

**Jumlah Penduduk Miskin Indonesia tahun 2015-2020 (000 jiwa)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Berdasarkan data diatas dapat dilihat jumlah penduduk miskin Sumatera Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai tahun 2020, jumlah penduduk miskin Sumut pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,508.000 jiwa. Angka ini turun dibandingkan tahun 2016 yaitu 1,453.000 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 1,327.000 jiwa , jumlah penduduk miskin Sumut cenderung turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 1,292.000 jiwa , lalu pada tahun 2019 menjadi 1,260.000 jiwa. Pada tahun 2020 jumlahnya menjadi 1,283.000 jiwa. Persentase kemiskinan tertinggi diperoleh dari pedesaan dibandingkan dari perkotaan. Disamping tergantung pada pendapatan per kapita, besarnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tergantung pula kepada corak distribusi pendapatan. Makin tidak merata distribusinya, makin besar persentase penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan,(Sukirno 2015).

**Tabel 1.2**  
**Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2018-2020**

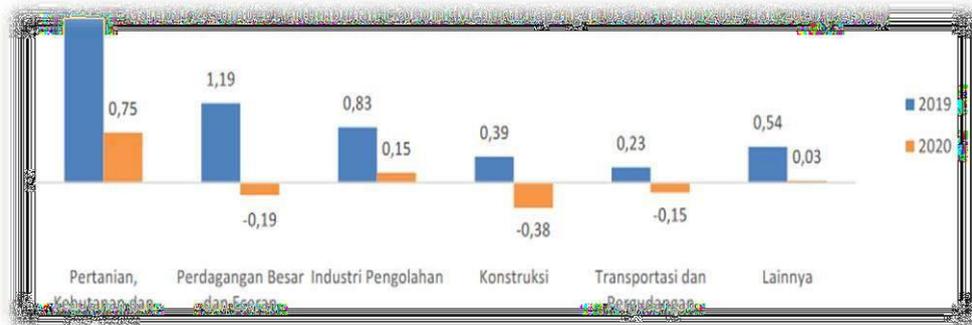
<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Nias	16,37	15,94	16,60
Mandailing Natal	9,58	9,11	9,18
Tapanuli Selatan	9,16	8,60	8,47
Tapanuli Tengah	13,17	12,53	12,38
Tapanuli Utara	9,75	9,48	9,37
Toba Samosir	8,67	8,60	8,71
Labuhan Batu	8,61	8,44	8,44
Asahan	10,25	9,68	9,04

Simalungun	9,31	8,81	8,46
Dairi	8,20	7,70	8,04
Karo	8,67	8,23	8,70
Deli Serdang	4,13	3,89	3,88
Langkat	10,20	9,91	9,73
Nias Selatan	16,65	16,45	16,74
Humbang Hasundutan	9,00	8,75	9,36
Pakpak Bharat	9,74	9,27	9,28
Samosir	13,38	12,52	12,48
Serdang Berdagai	8,22	7,90	9,79
Batu Bara	12,57	12,14	11,88
Padang Lawas Utara	10,06	9,60	9,70
Padang Lawas	8,41	8,28	8,37
Labuhan Batu Selatan	10,00	8,94	8,34
Labuhan Batu Utara	10,12	9,57	9,53
Nias Utara	26,56	24,99	25,07
Nias Barat	26,72	25,51	25,69
Sibolga	12,38	12,36	11,95
Tanjung Balai	14,64	14,04	13,33
Pematang Siantar	8,70	8,63	8,27
Tebing Tinggi	10,27	9,94	9,85
Medan	8,25	8,08	8,01
Binjai	5,88	5,66	5,71
padangsidempuan	7,69	7,26	7,40
Gunung Sitoli	18,44	16,23	16,41

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Dari tabel persentase penduduk miskin di Sumatera Utara menurut kabupaten/kota ditahun 2018 sampai tahun 2020. Kabupaten/kota yang memiliki penduduk miskin tertinggi pada tahun 2018 di kabupaten/kota Nias Barat yaitu 26,72%, ditahun 2019 mengalami penurunan sekitar 1,21% yaitu menjadi 25,51%, sedangkan ditahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,18% yaitu menjadi 25,69%. Sedangkan untuk persentase penduduk miskin Sumatera Utara menurut kabupaten/kota yang terendah pada tahun 2018 di Deli Serdang yaitu 4,13%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan 0,24% yaitu menjadi 3,89%. Sedangkan ditahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,1% yaitu menjadi 3,88%. Sedangkan untuk kabupaten Asahan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 yaitu 10,25% ,kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,57% yaitu menjadi 9,68% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,64% yaitu menjadi 9,04%. Kabupaten Asahan sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki 25 kecamatan dan 177 desa. Daerah yang cukup luas di Provinsi Sumatera Utara,serta dengan potensi kekayaan sumberdaya yang melimpah, yakni daerah lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Melihat kekayaan sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah yaitu berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, sehingga Kabupaten Asahan tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

**Gambar 1.7**  
**Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Asahan**  
**Tahun 2019-2020 (persen)**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)2020 ([www.bpsasahan.go.id](http://www.bpsasahan.go.id))

Dari tabel diatas pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2019-2020, pada tahun 2019 menurut lapangan usaha pertanian,kehutanan,dan perikanan sebesar 2,46% mengalami penurunan pada tahun 2020 sekitar 1,71% yaitu menjadi 0,75%,kemudian pada perdagangan besar & eceran pada tahun 2019 sebesar 1,19% juga mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi -0,19%. Pada industri pengolahan di tahun 2019 sebesar 0,83% mengalami penurunan ditahun 2020 sebesar 0,68% yaitu menjadi 0,15%. Begitu juga dengan konstruksi pada taun 2019 sebesar 0,39 menjadi -0,38 pada tahun 2020. Dan Transportasi pada tahun 2019 sebesar 0,23 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu menjadi -0,15%. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah, untuk melihat jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Asahan dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 1.8**  
**Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Asahan Tahun 2014-2019**



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan 2020 ([www.bpsasahan.go.id](http://www.bpsasahan.go.id))*

Dari data jumlah persentase penduduk miskin Kabupaten Asahan tahun 2014-2018. Dapat dilihat jumlah dan persentase penduduk miskin di kabupaten Asahan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu ditahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Asahan yaitu sebesar 8.367.000 jiwa dengan persentase 11,67%. Ditahun 2018 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang menjadi 7.414.000 jiwa dengan persentase menjadi 10,25%. Dan ditahun 2019 terus mengalami penurunan menjadi 7.053.000 jiwa dengan persentase 9,68%.

Terkait dengan kewajiban pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya, kebijakan yang di dilakukan dapat memberikan tantangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif, namun disisilain kewenangan pemerintah daerah harus memberikan konsekuensi kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi sumber keuangan secara optimal. Untuk melihat kualitas Sumber Daya

Manusia di Kabupaten Asahan dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 1.3**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Asahan tahun 2016-2020**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
IPM	68,71	69,10	69,49	69,92	70,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan (<https://www.bps.go.id/>)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Asahan mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 nilai IPM Kabupaten Asahan sebesar 68,71% dan ditahun 2017 sebesar 69,10% terlihat adanya perubahan sebesar 0,39%. Pada ahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,39% sehingga menjadi 69,49%. Pada tahun 2019 nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,92% dengan kenaikan yaitu 0,43%. Pada tahun 2020 nilai IPM di Kabupaten Asahan sebesar 70,29%. Dengan demikian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Asahan mengalami kenaikan disetiap tahunnya.

Desa Simpang Empat adalah salah satu desa di Kecamatan Simpang Empat yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan desa lainnya yaitu 14.275 jiwa. Akses kesehatan meupakan salah satu indikator dari ketahanan pangan,namun akses kesehatan dan tenaga kesehatan di desa Simpang Empat masih minim dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Bertani dan berkebun adalah salah satu mata pencaharian dominan di Desa Simpang Empat, pada masa pandemi covid-19 nilai perekonomian masyarakat didesa Simpang Empat menurun mengharuskan masyarakat untuk mengambil andil dalam ketersediaan kebutuhan secara pribadi pada beberapa komoditas seperti cabai,daging

ayam, bawang merah dan bawang putih, sehingga masyarakat di desa simpang empat melakukan *Urban Farming* yaitu bercocok tanam dilingkungan rumah. Hasil dari urban farming yang dilakukan sebagai upaya pemenuhan ketersediaan pangan rumah tangga.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19, dapat dilihat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid 19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan memberikan Instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada pasal 2 ayat 1 huruf (i) peraturan tersebut menyatakan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi dana atau pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. selanjutnya pada penjelasan perpu ini juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat dipergunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan covid-19. Hal ini juga sejalan dengan peraturan Pemerintah untuk memberikan keluasaan atas pengalihan dana desa untuk covid-19 seperti peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No 205/PMK.07/2019 tentang pengolahan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.6 Tahun 2020 Perubahan Atas Permendes PDPTT No.11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk

mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk :(1) Pencegahan dan Penanganan Covid-19, (2) padat karya Tunai Desa ; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa. Hal ini tentu berbeda dengan Permendes PDPT No 11 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan penggunaan dana desa ini ditujukan untuk penanganan pandemi covid-19.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA KETAHANAN PANGAN di ERA PANDEMI”** (studi kasus Desa Simpang Empat,kecamatan Simpang Empat,Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, dapat di identifikasikan bahwa masalah dalam penelitian ini adalah

1. Ketidacukupan konsumsi pangan di Indonesia tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019
2. Terjadinya penurunan beberapa sektor pertumbuhan PDB akibat adanya pembatasan sosial yang mengharuskan aktivitas masyarakat dilakukan dirumah secara online
3. Salah satu Indikator ketahanan pangan yaitu pertanian,kehutan,dan perikanan mengalami penurunan
4. Bagaimana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka Penelitian ini dibatasi dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap ketahanan pangan di era pandemi

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Dana Desa Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sebelum pandemi
2. Bagaimana ketahanan pangan rumah tangga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebelum dan selama pandemi covid-19

### **1.5 Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan Dana Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sebelum pandemi
2. Melakukan analisis evaluasi mengenai ketahanan pangan rumah tangga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebelum dan selama pandemi covid-19.

## **1.6 Manfaat penelitian Manfaat**

yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Akademik
  - a. bagi penulis, hasil penelitian ini memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan efisiensi dan efektivitas dana desa
  - b. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa berapa banyak anggaran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai selama pandemi covid-19 yang dikeluarkan untuk masyarakat
2. Non Akademik
  - a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dijadikan masukan yang bermanfaat dalam mengambil kebijakan dan pengambilan keputusan dalam sektor pengeluaran pemerintah, terutama yang berkaitan dengan strategi dalam program bantuan kepada masyarakat desa terhadap ketahanan pangan
  - b. Bagi stakeholder, hasil penelitian ini akan dijadikan acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dan juga untuk mengetahui seberapa besarnya anggaran pemerintah yang dikeluarkan dalam memberikan bantuan kemasyarakatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut pandangan ekonom klasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang dan modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam,(4). tingkat teknologi yang digunakan (Kuncoro,2004). Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut Todaro (2003), Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor,yaitu :

1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabnya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.
2. Akumulasi Modal Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.
3. Kemajuan Teknologi Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan

karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Sadono (2000), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Produk Domestik Bruto (PDB) Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Produk domestik bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah. Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang mempengaruhi besarnya output. Model pertumbuhan Solow juga dirancang untuk mengetahui apakah tingkat tabungan, stok modal, tingkat populasi dan kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan

pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum, ada beberapa model pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga saat ini yaitu : Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Teori Pertumbuhan Neo Klasik, Model Pertumbuhan Interegional, Teori Pertumbuhan Harrod-Domar dan Teori Pertumbuhan Kuznet.

## **A. Teori Klasik**

### **1. Adam Smith**

Teori Pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam bukunya berjudul *An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation* ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total.

#### **a. Pertumbuhan output**

Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:

1. Sumber daya alam
2. Sumber daya manusia

### 3. Stok kapital yang tersedia

Sumber-sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maka pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa ditingkatkan. Selanjutnya unsur jumlah penduduk dan stok kapital menentukan besarnya output masyarakat dari tahun ke tahun. Tetapi apabila output terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan (dieksploitasi) hingga batas ketersediaannya. Tingkat ketersediaan sumber daya alam ini akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi (dalam arti pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk) akan berhenti apabila batas atas ini tercapai. Unsur yang kedua adalah sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan output, unsur ini dianggap mempunyai peranan pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya apabila stok kapital yang tersedia membutuhkan pekerja 1 juta orang untuk menggunakannya, sementara jumlah tenaga kerja yang tersedianya 900 ribu orang maka jumlah penduduk yang akan menempati pekerjaan itu akan cenderung meningkat sehingga tenaga kerja yang tersedia akhirnya akan mencapai 1 juta orang. Unsur produksi yang ketiga yaitu stok kapital, yang secara aktif menentukan output. Smith memang memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan output. Apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital. Disamping itu laju pertumbuhan output juga tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital. Pertumbuhan itu akan terus melaju hingga akan

dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam dan dukungan sumber daya manusia yang terampil.

#### **b.Pertumbuhan penduduk**

Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno,2006).

#### **4.David Ricardo**

Menurut Ricardo, proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Kesimpulan umumnya juga masih tetap sama yaitu bahwa dalam perpacuan tersebut penduduklah yang akhirnya mencapai posisi stasioner. Seperti juga dengan Adam Smith, Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (yaitu, sumber-sumber alam) tidak dapat bertambah sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Perbedaan terutama terletak pada penggunaan alat analisis mengenai distribusi pendapatan (berdasarkan teori Ricardo yang terkenal itu) dalam penjabaran mekanisme pertumbuhan dan pengungkapan peranan yang lebih jelas dari sektor pertanian di antara sektor-sektor lain dalam proses pertumbuhan. (Kuncoro, 2000) Proses pertumbuhan yang digambarkan Ricardo ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terbatasnya jumlah tanah, yang sangat susah untuk diperluas, sebagai

faktor produksi.

b. Peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja (penduduk) sesuai dengan tingkat upah yaitu apakah di atas atau dibawah tingkat upah minimal, yang oleh Ricardo disebut tingkat upah alamiah (natural wage).

c. Akumulasi kapital terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi meningkat.

d. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi.

e. Masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan.

### **5. Thomas Robert Malthus**

Dalam pandangan mazhab Klasik mengenai perkembangan ekonomi secara umum, nampak adanya pengaruh dari gagasan Malthus tentang signifikansi masalah pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan ekonomi. Dengan demikian maka hal ini perlu diperhatikan karena masalah penduduk mempunyai arti dan relevansi terhadap perkembangan ekonomi. Menurut Malthus secara alamiah populasi akan terus mengalami peningkatan lebih cepat daripada suplai makanan. Produksi makanan per kapita, tentu saja akan mengalami penurunan, sementara populasi mengalami kenaikan. Malthus berpendapat bahwa tidak menjadi jaminan kalau pertumbuhan penduduk secara kuantitatif akan berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan. Malthus membeberkan sejumlah faktor kendala terhadap kelangsungan pertumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitatif sekali-kali tidak menjadi jaminan bahwa pendapatan riilnya juga akan meningkat dengan sepadan. Pertumbuhan penduduk hanya mendukung pertumbuhan terhadap tata susunan ekonomi, apabila perkembangan ekonomi dapat meningkatkan daya beli real (permintaan efektif)

masyarakat secara menyeluruh. Barulah, dalam keadaan demikian maka akan terlaksana akumulasi modal sebagai ciri pokok dalam proses pertumbuhan, sekaligus juga akan menimbulkan permintaan akan tenaga kerja. Kendala terhadap perkembangan tersebut oleh Malthus diungkapkan dalam teorinya mengenai ketidak mampuan untuk berkonsumsi secara memadai (theory of underconsumption). (Boediono,2009)Masalah penting dalam pembahasan Malthus yang menarik perhatian dan sampai sekarang masih relevan bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang ialah segi institusi yang bersifat sosiologis-ekonomis. Dalam masyarakat di negara-negara maju,termasuk dikalangan cendekiawan,sering terdapat pandangan seolah-olah keterbelakangan dan kemacetan ekonomi di belahan dunia lain (Amerika Latin, Afrika, Asia) disebabkan oleh tabiat dan perilaku penduduk setempat, yaitu sikap memudahkan sesuatu, malas dan mempunyai ketergantungan pada alam yang sangat tinggi, keadaan sumber daya alam yang sangat menguntungkan dan memudahkan kehidupan manusia. (Boediono, 2009)Pandangan yang dangkal tetapi populer itu kebenarannya dibantah oleh Malthus. Malthus menunjuk kepada kenyataan institusional dalam tata susunan ekonomi masyarakat yang menjadi kendala besar bagi kemajuan rakyat. Keterbelakangan dan kemiskinan penduduk di negara-negara yang dimaksud bukanlah disebabkan oleh terbatasnya tanah subur atau semakin kecilnya luas tanah karena penduduk bertambah; bukan pula oleh “kemalasan” penduduk. Kemiskinan itu ada sangkut-pautnya dengan kenyataan bahwa tanah yang sangat luas dikuasai oleh segelintir kalangan atas dalam masyarakat yang terdiri dari sejumlah keluarga tuan tanah. Konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah serupa itu tidak memberikan dorongan dan sama sekali

tidak mengandung perangsang bagi petani penggarap tanah untuk mencari kemajuan dengan cara meningkatkan hasil produksinya, apalagi dengan cara melakukan investasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar hasil produksi tanah dinikmati oleh tuan tanah, sedangkan hasil produksi masyarakat kecil (golongan lemah) lebih diperuntukkan buat pemenuhan kebutuhan dasar dan hanya sebagian kecil yang diinvestasikan. (Boediono, 2009)

## **6. Teori Pertumbuhan Ekonomi Karl Max**

Pola pendekatan dinamika (pattern of dynamic approach) yang menyangkut perkembangan masyarakat secara menyeluruh dalam jangka panjang, bukanlah cara pandang yang baru timbul di zaman modern. Haluan pemikiran tersebut telah terkandung di dalam gagasan-gagasan para pakar teori klasik. Pola pendekatan demikian lebih menonjol lagi dalam sistem pemikiran Karl Marx, yang dapat dianggap sebagai teori dinamika yang paling komprehensif. Dalam hubungan itu, pandangan para pakar teori klasik dan Karl Marx dapat dimasukkan dalam kategori grand theories dan kadang –kadang sebagai magnificent dynamics. Karl Marx menyoroti banyak aspek dalam teorinya yang terkenal sebagai teori konflik. Dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, Marx menonjolkan pendeskripsian tentang perkembangan masyarakat dari polanya yang sederhana hingga menjadi masyarakat yang berstruktur kompleks dan dengan pembagian kerja yang ketat dalam masyarakat kapitalis. (Boediono, 2009).

Dalam gagasannya mengenai konsep materialisme historis, Marx mengungkapkan bahwa aktivitas produktif manusia merupakan kunci untuk menganalisis kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi substansi masyarakat kapitalis, yaitu bahwa seluruh masyarakat harus membuat diri mereka produktif

dari tahun ketahun. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat terikat dalam produksi yang bersifat materi. Para kapitalis merupakan pihak yang memiliki posisi tawar tertinggi, sedangkan kaum buruh hanya dapat menjual tenaganya kepada majikan sebagai satu input dalam proses produksi. Maka, terjadilah eksploitasi besar-besaran terhadap kaum buruh. Pada masa itu modal merupakan kunci untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Sejalan dengan perkembangan teknologi, para pengusaha yang menguasai faktor produksi akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan menginvestasikan akumulasi modal yang diperolehnya. Menurut Marx, kemampuan kapitalis untuk mengakumulasi modal terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dipekerjakannya. Nilai buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah merupakan manifestasi dari jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut. (Boediono,2009)

## **B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes**

Perapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk konsumsi. Yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijabatani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tak

terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut teijembatani. Jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagian besar akan tergantung pada investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dan modal merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bilamana harapan laba tinggi, pengusaha menginvestasi lebih besar. Suku bunga, yang merupakan faktor lainnya dari investasi, tergantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan untuk mengkonsumsi turun. Sebaliknya kecenderungan berkonsumsi dapat mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan kenaikan pada investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan. Dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung menggumpal (kumulatif). Akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi. (Jhingan, 2010) Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier K. Pengali (multiplier) ini memperlihatkan hubungan yang tepat, berkat adanya kecenderungan berkonsumsi tersebut, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Ini berarti, bila investasi agregat naik, pendapatan akan meningkat, yang besarnya adalah K kali kenaikan investasi

tersebut. Rumusnya ialah  $\Delta Y = K\Delta I$ , dan  $1-1/K$  mewakili kecenderungan marginal mengkonsumsi. Jadi pengali  $K = 1/1-MPC$ . Karena kecenderungan marginal mengkonsumsi turun, berkat adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan dosis besar guna memperoleh tingkat pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian. Inilah secara singkat teori Keynes mengenai pekerjaan. (Jhingan,2010) Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam “General Theory”-nya. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrod,Domar,Joan Robinson danlainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam karangannya yang berjudul “Economic Possibilities for Our Grand Children” Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu (i) kemampuan kita mengendalikan penduduk; (ii) kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil; (iii) kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan mempedomani hal-hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan; dan(iv)tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Sejauh menyangkut kekhawatiran akan masa depan kapitalisme, Keynes bersifat optimis Keynes menganggap kapitalisme sebagai suatu mekanisme yang mempunyai kekenyalan dan daya adaptasi yang besar dalam membentuk dirinya sendiri menurut keadaan. Keynes membangun teori kebangkrutan kapitalisnya (stagnasi jangka panjang) berdasarkan over-produksi umum, konsumsi rendah yang kronis dan merosotnya efisiensi marginal modal di masa depan. (Jhingan, 2010)

## **C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo klasik**

### **1.W.W.Rostow**

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh W.W. Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* pada Maret 1956 berjudul *The Take-Off Into Self-Sustained Growth* pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah pertumbuhannya hanya dalam tiga tahap :tahap prekondisi tinggal landas (yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus. (Boediono,2009) Rostow pulalah yang membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminologi 'less developed', untuk menyebut kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminologi 'more developed' untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan sektor kapitalis modern. Dalam hal prakondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses di mana masyarakat berkembang dari suatu tahap ke tahap yang lain. Tahap-tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel –variabel kritis atau strategis yang dianggap mengangkat kondisi-kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi menuju tahapan baru yang berkualitas. Teori ini secara mendasar bersifat unilinear dan universal, serta dianggap bersifat permanen. Sebagai bagian teori modernisasi, teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan Barat. Para pakar ekonomi menganggap bahwa teori pertumbuhan ekonomi ini merupakan contoh terbaik dari

apa yang diistilahkan sebagai ‘teori modernisasi’. (Kuncoro M. ,2000) Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap:

1. Masyarakat tradisional (The Traditional Society),
2. Masyarakat Pra-kondisi untuk Periode Lepas Landas (The Preconditions for Take Off),
3. Proses Lepas landas (The Take Off),
4. Gerak Menuju Kedewasaan (Maturity)
5. Tingkat Konsumsi Tinggi (High Mass Consumption)

## **2. Harrod – Domar**

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). (Boediono, 2009) Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:

- a. Perkonomian bersifat tertutup.
- b. Hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan.
- c. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return to scale)
- d. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (steady growth) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud disini adalah kondisi dimana barang

modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (Capital Output Ratio/COR) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ( $Y = C + I$ ). Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:

$$g = K = n \dots\dots\dots(2-1)$$

Dimana:

$g$  = Growth (tingkat pertumbuhan output)  $K$  = Capital (tingkat pertumbuhan modal)  $n$  = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

**D. Produk Domestik Bruto(PDB)**

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai perekonomian sedang berlangsung baik atau buruk. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB) / Gross Domestic Product (GDP). Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi

dalam sebuah negara pada suatu periode. Dalam Gross Domestic Product (GDP) terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan.<sup>46</sup> Selain itu, Gross Domestic Product (GDP) juga mengukur dua hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian (Mankiw, 2007). Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDB yaitu (Case & Fair, 2008):

a. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam memproduksi barang akhir.

b. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada semua barang akhir selama satu periode tertentu.

c. Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi adalah metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik orang luar negeri atau warga negara itu sendiri.

### **2.1.2 Pembangunan Ekonomi**

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda antara satu

orang dengan orang lainnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum terdapat suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, Jhingan (2012).

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Sedangkan menurut Tikson (2005), Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dll. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dari spiritualisme ke materialisme/sekulerisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional, Jhingan (2012).

Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan (*development economic*), merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang. Tujuan dari analisisnya adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, Jhingan (2012).

Beberapa pengertian dan definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli :

#### **A. Adam Smith**

Hukum Alam, Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara *agregat*. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan.

Pembagian Kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja penghematan waktu dalam memproduksi barang penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

Proses Penumpukan Modal. Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Agen Pertumbuhan, menurutnya para petani, produsen dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan meningkat pula ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat kumulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Di lain pihak naiknya produktifitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi

karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan, Jhingan (2012).

#### Kelemahan Teori Adam Smith

- a. Pengabaian masyarakat secara luas
- b. Alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung
- c. Pengabaian pengusaha (wiraswasta)

#### a. **David Ricardo**

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital. Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja, Jhingan (2012).

### **b. Thomas Robert Malthus**

Malthus menitikn perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah, menurut Teori Malthus merupakan sebab utama keternbelakangan. Untuk pembangunan, negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, perluasan perdagangan internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif, dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum, Jhingan (2012).

### **c. Teori Karl Marx**

Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Kota Trier Jerman. Pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh Darwin dan menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menenukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi.

1. Menurutnya berdasarkan sejarah, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap
2. Masyarakat kumunal primitive, yang masih menggunakan alat-alat produksi sederhana yang merupakan milik kumunal. Tidak ada surplus produksi di atas konsumsi.
3. Masyarakat perbudakan, adanya hubungan antar pemilik factor produksi dan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka. Para budak diberi upah sangat minim Mulai ada spesialisasi untuk bidang pertanian, kerajinan tangan dsb. Karena murah nya harga buruh maka minat pemilik factor produksi untuk memperbaiki alat-alat yang dimilikinya rendah. Buruh makin lama sadar dengan kesewenang-wenangan yang dialaminya sehingga menimbulkan perselisihan antara dua kelompok tersebut.
4. Masyarakat fiodal, kaum bangsawan memiliki factor produksi utama yaitu tanah.. Para petani kebanyakan adalah budak yang dibebaskan dan mereka mengerjakan dahulu tanah milik bangsawan. Hubungan ini mendorong adanya perbaikan alat produksi terutama di sector pertanian. Kepentingan dua kelas tersebut berbeda, para feodal lebih memikirkan keuntungan saja dan kemudian mendirikan pabrik-pabrik. Banyak timbul pedagang-pedagang baru yang didukung raja yang kemudian membutuhkan pasar yang lebih luas. Perkembangan ini menyebabkan timbulnya alat produksi kapitalis dan menghendaki hapusnya sistem fiodal. Kelas borjuis yang memilki alat-alat produksi menghendaki pasaran buruh yang bebas dan hapusnya tarif serta rintangan lain dalam perdagangan yang diciptakan kaum fiodal sehingga kemudian masyarakat tidak lagi menyukai system ini
5. Masyarakat kapitalis, hubungan produksinya didasarkan pada pemilikan

individu masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi. Kelas kapitalis mempekerjakan buruh. Keuntungan kapitalis membesar yang memungkinkan berkembangnya alat-alat produksi. Perubahan alat yang mengubah cara produksi selanjutnya menyebabkan perubahan kehidupan ekonomi masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kaum kapitalis dan buruh semakin meningkat dan mengakibatkan perjuangan kelas.

6. Masyarakat sosialis, kepemilikan alat produksi didasarkan atas hak milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama dan saling membantu diantara buruh yang bebas unsur eksploitasi. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat.
7. Marx meramalkan keruntuhan system kapitalis, menurutnya terjadi karena adanya :
  - a. Akumulasi yang menyebabkan perbedaan kaya miskin semakin lebar
  - b. Kesengsaraan, karena kemiskinan semakin luas
  - c. Krisis, karena daya beli masyarakat semakin berkurang karena pendapatan buruh semakin berkurang, sehingga terjadilah kelebihan produksi atas konsumsi (*over production*). Harga barang-barang merosot dan produksi terpaksa ditahan.
  - d. Konsentrasi, penggabungan perusahaan-perusahaan agar tidak bangkrut karena persaingan dalam masyarakat kapitalis

Menurut Karl Marx masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahap-tahap tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan juga hubungan-hubungan produksi yang telah dijelaskan di atas, namun sejarah telah membuktikan bahwa periode evolusi yang dikemukakan oleh Marx ternyata keliru. Tidak ada masa dalam sejarah masyarakat yang melalui

tahapan evolusi sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya sebagaimana system yang diyakini oleh Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu, malah dapat terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula di saat satu wilayah dari suatu Negara sedang mengalami system yang menyerupai masyarakat fiodal, sistem kapitalis berlaku di wilayah lainnya dalam Negara yang sama. Jadi pernyataan bahwa tahapan dari satu system ke system berikutnya mengikuti pola evolusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx dan teori evolusi tidak dapat dibuktikan sama sekali, Jhingan (2012).

## **B. Aliran Kontrarevolusi Neo-klasik / Fundamentalisme Pasar.**

Menurut teori ini pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 faktor : kenaikan kuantitas & kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi, Jhingan (2012).

### ***a. Aliran Neo-Klasik***

Aliran yang menggantikan aliran klasik. Aliran ini mempelajari tingkat bunga (harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan yang akan datang). Neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diiktisarkan sebagai berikut:

#### **1. Akumulasi Kapital**

Menurut Neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan meningkatkan tingkat tabungan. Pada suatu tingkat teknik tertentu bunga menentukan tingkat investasi. Perubahan teknologi menurut Neo-klasik terutama adalah penemuan-penemuan baru yang mengurangi penggunaan tenaga buruh/ relative lebih bersifat “penghemat buruh” dari pada “penghemat capital”. Jadi kemajuan-kemajuan

teknik akan menciptakan permintaan-permintaan yang kuat akan barang-barang capital.

2. Perkembangan sebagai proses Gradual / terus-menerus

Menurut Alfred Marshall bahwa perekonomian sebagai suatu kehidupan organic yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai proses yang gradual atau terus-menerus.

3. Perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif

Proses yang harmonis & kumulatif ini meliputi berbagai factor dimana factor itu tumbuh bersama-sama. Misal, bila teknik produksi baru yang akan menaikkan produksi total / akan menaikkan pendapatan total dimana untuk menambah produksi dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan lebih pandai, sehingga ada kenaikan permintaan terhadap produksi itu, karena kenaikan pendapatan Marshall menggambarkan pula harmonisnya perkembangan itu karena adanya internal economies & external economies. Internal Economies timbul dari adanya mesin-mesin yang lebih luas manajemen yang lebih baik dan sebagainya sehingga ada kenaikan produksi. External economies timbul adanya kenaikan produksi pada umumnya dan ada hubungannya dengan perkembangan pengetahuan dan kebudayaan. Jadi Marshall menekankan pada adanya sifat saling ketergantungan dan komplementer dari perekonomian. Mengenai kumulatifnya menurut Alien Young bahwa berkembangnya industri itu tergantung pada baiknya pembagian kerja diantara para buruh.

4. Optimis terhadap perkembangan ekonomi

Kaum klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena keterbatasan sumber daya alam. Dipihak lain berpendapat bahwa adanya

kemampuan manusia mengatasi keterbatasan pertumbuhan itu. Selalu akan ada kemajuan-kemajuan pengetahuan teknik secara gradual dan kontinyu dan akan selalu ada permintaan masyarakat, hal ini menimbulkan kemungkinan baru bagi buruh untuk kenaikan upah. Bagi Neo-klasik hal penting untuk pertumbuhan ekonomi ialah kemauan untuk menabung, Jhingan (2012).

5. Aspek internasional perkembangan ekonomi tingkat perkembangan ekonomi:

- A. Mula-mula Negara meminjam capital / impor capital.
- B. Kemudian Negara peminjam tersebut setelah dapat menghasilkan dengan capital pinjaman tadi, membayar deviden dan bunga atas pinjaman tersebut.
- C. Tingkat selanjutnya setelah penghasilan nasional Negara itu meningkat terus, maka sebagian dari penghasilan itu digunakan untuk melunasi utang dan sebagian lagi dipinjamkan kenegara lain yang membutuhkan.
- D. Tingkat ke empat, Negara tersebut kemudian sudah menerima deviden dan bunga lebih besar dari pada yang dibayar, jadi ada surplus. Dengan kata lain untungnya semakin sedikit dan hutangnya semakin banyak.
- E. Akhirnya Negara itu hanya selalu menerima deviden dan bunga saja dari Negara lain.

#### **b. Teori Schumpeter**

Teori Schumpeter ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada tahun 1911 yang pada tahun 1934 diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Kemudian dia mengulas teorinya lebih dalam mengenai proses pembangunan dan faktor

utama yang menentuka pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1939 dengan judul *Business Cycle*. Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemacetan(*Satagnasi*). Pendapat ini sama dengan pendapat kaum Klasik, Jhingan (2012).

Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah *proses inovasi* dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para Pengusaha (*entrepreneurs*). Dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan *output* total masyarakat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, meskipun keduanya merupakan sumbu peningkatan *output* masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam “teknologi” produksi itu sendiri. Misalnya, kenaikan *output* yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan *output* yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha (*entrepreneurs.*). Inovasi disini bukan hanya berarti perubahan yang “radikal” dalam hal teknologi, inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai

penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya.

Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang setiap orang untuk menciptakan hal-hal yang baru (inovasi), dan lingkungan yang paling cocok untuk itu adalah masyarakat yang menganut paham *laissez faire*, bukan dalam masyarakat sosial ataupun komunis yang cenderung mematikan kreativitas penduduknya, Jhingan (2012).

### **C. Teori Keynes.**

Menurut Keynes (Jhingan, 2012). Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkan, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk mengkonsumsi.

#### **a. Teori Harrod-Domar**

Pada hakikatnya teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teori makro Keynes. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena mengungkapkan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan mantab. Menurut teori Harrod-Domar,

pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan, Jhingan (2012).

Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional. mempunyai beberapa asumsi yakni :

- A. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan faktor – faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh .
- B. Perekonomian terdiri dari dua sector : sector rumah tangga dan sector perusahaan.
- C. Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional.
- D. Kecenderungan menabung besarnya tetap.

#### **b. Teori Evsey D. Domar**

Karena investasi menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan, maka seberapa tingkat kenaikan investasi sama dengan kenaikan pendapatan dan kapasitas produksi diperlukan anggapan-anggapan teori sebagai berikut:

- A. Perekonomian sudah ada dalam pengerjaan tingkat penuh (*full employment income*)
- B. Tidak ada pemerintah dan perdagangan luar negeri
- C. Tidak ada keterlambatan penyesuaian (*lag of adjustment*)
- D. Hasrat menabung marginal dan hasrat menabung rata-rata sama.
- E. *Marginal propensity to savedan Capital coeffisien* adalah tetap.

Dari teori ini dinyatakan bahwa kenaikan investasi akan menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan. Perekonomian kenyataannya menghadapi

masalah yaitu bila investasi hari ini tidak cukup maka akan terjadi pengangguran. Bila ada investasi hari ini maka besok diperlukan investasi yang lebih banyak untuk menaikkan permintaan sehingga kapasitas produksi bertambah, Jhingan (2012).

### **c. Teori Harrod**

Harrod menyelediki keadaan perkembangan ekonomi secara terus-menerus dan cara untuk mencapai perkembangan ekonomi. Ia menyatakan bahwa tabungan sama dengan investasi ( $GC=IS$ ) dimana  $G$  adalah tingkat pertumbuhan output atau perbandingan antara naiknya income dan total income pada waktu tertentu.  $C$  adalah tambahan kapital atau perbandingan antara investasi dan kenaikan pendapatan ( $I/DY$ ) dan  $S$  adalah tabungan. Investasi dan pendapatan harus tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang mantap untuk mempertahankan pengerjaan penuh dalam jangka panjang.

Kelemahan teori Harrod-Domar adalah teori menggunakan asumsi yang sulit. Faktor-faktor penting seperti hasrat menabung dan rasio kapital *output* dianggap tetap, sedangkan kenyataan pada jangka panjang faktor tersebut berubah-ubah yang akan mengubah syarat yang dibutuhkan untuk adanya pertumbuhan ekonomi, Jhingan (2012).

### **d. Teori Stagnasi Sekular (*Secular Stagnation*)**

Stagnasi sekuler menunjukkan suatu fase perkembangan kapitalis yang telah masak dimana tabungan bersih pada tingkat full employment cenderung bertambah, sedangkan investasi bersihnya menurun. Ini menandakan kecenderungan jangka panjang menuju pada pengurangan kegiatan ekonomi perumusan sebab-sebab stagnasi sekuler adalah:

- A. Menitik beratkan pada peranan faktor faktor eksogen seperti teknologi, perkembangan penduduk, pembukaan dan perkembangan daerah baru. Menurut A. Hansen, perkembangan penduduk yang cepat, pembukaan daerah baru dan kemajuan teknologi akan mendorong investasi dan menaikkan pendapatan. Menurut Keynes, perkembangan penduduk akan mendorong kenaikan ekonomi, menaikkan daya beli dan dapat memperluas pasar. Tertundanya perkembangan penduduk mengakibatkan akumulasi kapital relatif lebih banyak dari pada tenaga kerja.
- B. Menitik beratkan pada perubahan-perubahan dasar di dalam lembaga-lembaga sosial seperti meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dan perkembangan organisasi buruh.
- C. Menitik beratkan pada faktor-faktor endogen seperti perkembangan persaingan dan konsentrasi-konsentrasi perusahaan dalam industri.

### **2.1.3 Pendapatan Nasional**

Menjumlahkan seluruh pendapatan agregat yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi *output* tersebut. “Pada paruh kedua abad ke-18, Francois Quesney adalah yang pertama kali mengukur aktivitas ekonomi atas dasar aliran. Pada tahun 1758 dia mempublikasikan *Tableau Economique*, yang membahas *circular flow* dari *output* dan pendapatan pada berbagai sektor dalam perekonomian. Pandangannya mungkin terinspirasi dari pengetahuannya tentang aliran memutar atau *circular flow* darah dalam tubuh, Quesney adalah dokter resmi bagi king louis xv dari Prancis”. Manurung dan Prathama (2015).

“Perhitungan pendapatan nasional adalah berdasarkan ide bahwa belanja

seseorang menjadi penerimaan orang lain. Ide bahwa belanja sama dengan penerimaan ini diungkapkan dalam sistem pembukuan *double-entry*, sehingga belanja pada *output* agregat dicatat pada sisi buku dan pendapatan dari sumber daya dicatat pada sisi lainnya. GDP dapat diukur dengan belanja total pada produksi Amerika atau dengan pendapatan total yang diterima dari produksi tersebut. Pendekatan pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran agregat pada seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun. Pendekatan pendapatan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi *output* tersebut. Manurung dan Prathama (2015).

#### **A. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pengeluaran**

Seperti telah disebutkan di atas, salah satu cara untuk mengukur nilai GDP adalah dengan menjumlahkan seluruh belanja pada barang dan jasa akhir yang diproduksi perekonomian dalam satu tahun. Cara paaling mudah dalam memahami pendekatan pengeluaran pada GDP adalah membagi pengeluaran agregat menjadi empat komponen : konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor neto. Kita akan membahasnya satu per satu Manurung dan Prathama (2015).

Konsumsi atau secara lebih spesifik pengeluaran konsumsi perorangan adalah pembelian barang dan jasa akhir oleh rumah tangga selama satu tahun. Konsumsi adalah belanja yang paling mudah dipahami dan juga bentuk belanja yang terbesar, yaitu sebesar dua pertiga dari GDP Amerika tahun 1990. Konsumsi meliputi pembelian jasa seperti *dry cleaning*, potong rambut, dan perjalanan udara, pembelian tidak tahan lama seperti sabun, sop, dan pembelian barang tahan

lama seperti televisi dan mebel. Barang tahan lama adalah yang dapat digunakan paling tidak selama tiga tahun. Manurung dan Prathama (2015).

Investasi, atau secara spesifik *investasi domestik swasta bruto* adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Secara lebih umum, investasi meliputi belanja pada produksi saat ini yang tidak digunakan pada saat ini. Bentuk investasi yang paling penting adalah kapital fisik baru, seperti bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Investasi juga meliputi pembelian konstruksi pemukiman baru. Meskipun investasi berfluktuasi dari tahun ke tahun, secara rata-rata investasi bernilai sepertujuh dari GDP Amerika selama tahun 1990-an.

Pembelian pemerintah, atau secara lebih spesifik *konsumsi dan investasi bruto pemerintah*, mencakup belanja semua tingkat pemerintahan pada barang dan jasa, dari pembersihan jalan bersalju sampai pembersihan ruang pengadilan, dari buku perpustakaan sampai upah petugas perpustakaan. Pembelian pemerintah bernilai hampir seperlima dari GDP Amerika selama tahun 1990-an. Pembelian pemerintah, dan juga GDP, tidak mencakup pembayaran tranfer, seperti sosial security, bantuan pemerintah kepada penerima bantuan dalam pengertian sebenarnya.

Komponen terakhir dari pengeluaran agregat adalah hasil interaksi antara perekonomian Amerika dan luar negeri. Ekspor neto sama dengan nilai ekspor barang dan jasa Amerika dikurangi impor barang dan jasa Amerika. Ekspor neto tidak hanya meliputi nilai perdagangan barang (yaitu barang yang dapat anda jatuhkan di atas kaki anda) tetapi juga jasa (*invisibles*, seperti parawisata, asuransi, akuntansi dan konsultasi). Mengingat belanja untuk konsumsi, investasi

dan pembelian pemerintah meliputi juga pembelian barang dan jasa, maka belanja tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari GDP Amerika, sehingga kita harus mengurangi impor dari ekspor untuk mendapatkan efek neto dari sektor luar negeri pada GDP. Nilai impor Amerika melebihi nilai ekspor hampir pada setiap selama beberapa dekade terakhir ini, yang berarti bahwa ekspor neto Amerika selama ini selalu negatif.

Dalam pendekatan pengeluaran, pengeluaran agregat negara sama dengan penjumlahan konsumsi (C), investasi (I), pembelian pemerintah (G), dan ekspor neto yaitu nilai ekspor (X), dikurangi dengan nilai impor (M), atau (X-M). Penjumlahan komponen tersebut menghasilkan pengeluaran agregat, atau GDP.

#### **B. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pendapatan**

Pendekatan pengeluaran menjumlahkan atau mengagregasikan pendapatan dari suatu produksi. Sistem pembukuan *double-entry* dapat memastikan bahwa nilai *output* agregat sama dengan pendapatan agregat yang dibayarkan untuk sumber daya yang digunakan dalam produksi *output* tersebut yaitu upah, bunga, sewa dan laba dari produksi. Harga *Hershey bar* mencerminkan pendapatan yang diterima semua pemilik sumber daya sehingga sehingga batangan permen tersebut sampai di rak grosir. Pendapatan agregat sama dengan semua penjumlahan pendapatan yang diterima pemilik sumber daya dalam perekonomian (karena sumber dayanya digunakan dalam proses produksi). Jadi kita dapat mengatakan bahwa Pengeluaran Agregat = GDP = Pendapatan Agregat.

Suatu produk jadi biasanya diproses oleh beberapa perusahaan dalam perjalanannya menuju konsumen. Meja kayu, misalnya, mulanya sebagai kayu mentah, kemudian dipotong oleh perusahaan pertama, dipotong sesuai kebutuhan

mebel oleh perusahaan kedua, dibuat meja oleh perusahaan ketiga, dan dijual oleh perusahaan keempat. *Double counting* dihindari dengan cara hanya memperhitungkan nilai pasar dari meja pada saat dijual kepada pengguna atau dengan cara menghitung nilai tambah dari setiap perusahaan sama dengan harga jual perusahaan tersebut dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan atas *input* dari perusahaan lain. Nilai tambah setiap tahap mencerminkan nilai tambah pada semua tahap produksi sama dengan nilai pasar barang akhir, dan penjumlahan nilai tambah seluruh barang dan jasa akhirnya adalah sama dengan GDP berdasarkan pendekatan pendapatan.

#### **2.1.4. Teori Pengeluaran Pemerintah**

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional. Kedua pandangan yang berbeda mengenai pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) dalam kajian teori ekonomi makro dapat dijelaskan sebagai berikut (Manik & Hidayat, 2010):

#### **2.1.4 Teori Makro**

Pengeluaran Pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan Pemerintah yang dibiaya oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono,1999)

- a. Pengeluaran Pemerintah untuk membeli barang dan jasa.

- b. Pengeluaran Pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
- c. Pengeluaran Pemerintah untuk Transfer Payment. Transfer Payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat.

$Tr = PI - NNI + iuran asuransi + laba ditahan$

Keterangan :

PI = Pendapatan Pereorangan

NNI = Pendapatan Nasional Neto

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi. Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam

presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

### 1. Teori Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GDP yang didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, U.S dan Jepang. Hukum wagner berisi apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Pengeluaran 31 pemerintah yang semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya Hukum wagner ditunjukkan pada kurva di bawah ini :

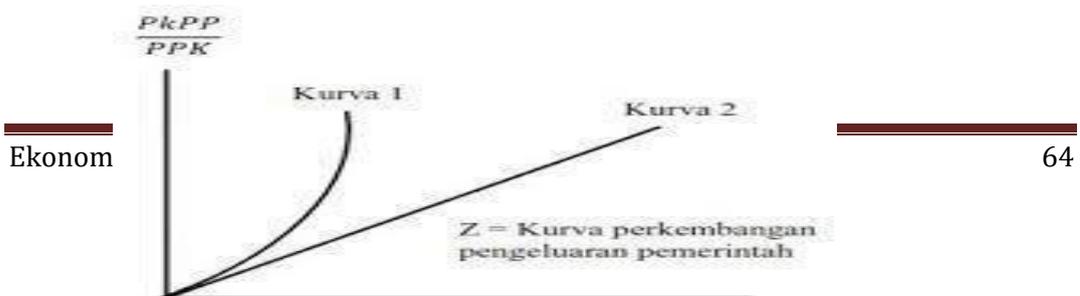
$$PPkP < \frac{PPkP}{PPK1} < \dots < \frac{PPkP}{PPk1} \dots \dots \dots$$

Keterangan :

PPkP : Pengeluaran Pemerintah Per Kapita

PPK : Pendapatan perkapita yaitu GDP/Jumlah

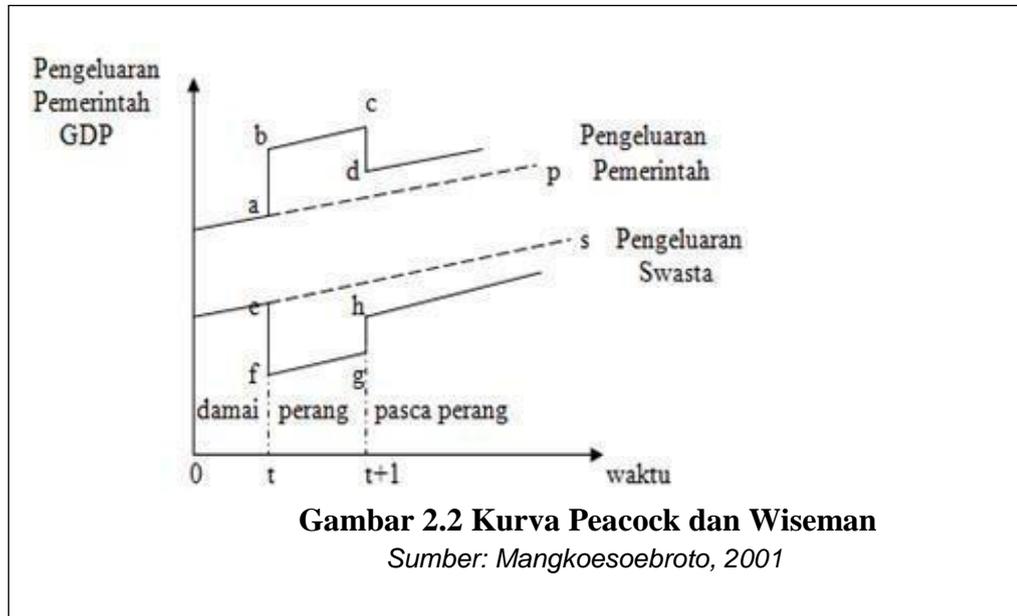
penduduk 1,2,...,n : Jangka Waktu (tahun)



## **2 Teori Peacock dan Wiseman**

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai sematamata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ketingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali

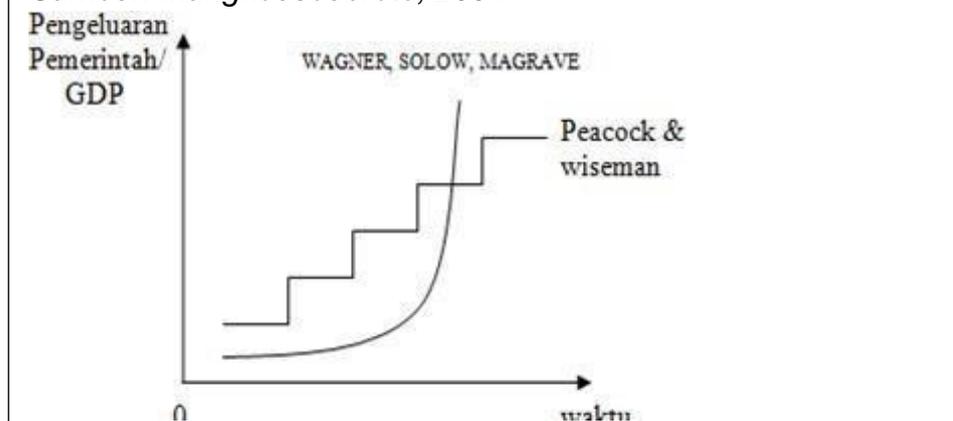
pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini:



Dalam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun t+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga

**Gambar 2.3 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave**

Sumber: Mangkoesobroto, 2001



Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Solow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. Sedangkan tujuan dari teori mikronya, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan

tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Penentuan Permintaan

$$U_i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana:

$$U_i = f(G, X)$$

G = vektor dari barang publik X = vektor barang swasta

i = individu; = 1, ....., m

U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak  $G_k$ . Untuk menghasilkan barang K sebanyak  $G_k$ , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat.

b. Penentuan Permintaan

$$U_i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana:

$$U_i = f(G, X)$$

G = vektor dari barang publik X = vektor barang swasta

$i = \text{individu}; = 1, \dots, m$

$U = \text{fungsi utilitas}$

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu ( $i$ ) membutuhkan barang publik ( $K$ ) sebanyak  $G_k$ . Untuk menghasilkan  $i$  barang  $K$  sebanyak  $G_k$ , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

c. Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S) \dots \dots \dots (2-3)$$

$U_p = \text{fungsi utilitas}$

$S = \text{keuntungan yang diperoleh politisi}$   $G = \text{vektor barang publik}$

$X = \text{vektor barang swasta}$

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:  $\text{Max}$

$$U_i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-4)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:  $P_x X + t B < M_i$

$$\dots \dots \dots (2-5)$$

Dimana:

$P = \text{vektor harga barang swasta}$   $X = \text{vektor barang swasta}$

$B_i$  = basis pajak individu 1  
 $M_i$  = total pendapatan individu 1

$T$  = tariff pajak Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*PriceTaker*). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang publik, sehingga ia bertindak sebagai pengambil output (*OutputTaker*) .

## 2.2 Penelitian Terdahulu

### 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Erfly Fernando Maun	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Thalaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan	Efektivitas BLT Dana Desa	Efektivitas Penyaluran BLT Di Desa Thalaitad Sudah Bekerja Sesuai Dengan Prosedur Dan Tepat Sasaran
2	Basoiping	Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19 : Tinjauan Perpektif Ekonomi Dan Sosial	Perlindungan Sosial Melalui BLT	Secara ekonomi, pemberian BLT di satu sisi memberikan dampak yang sangat signifikan untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK), namun dari segi sosial dapat memicu gejolak berupa konflik.
3	Aisyah,	Aisyah, I. S. (2020). Ketahanan Pangan Keluarga Di Masa Pandemi COVID 19. <i>Jurn Kesehatan Komunitas Indonesia</i> , 16(2).	Ketahanan pangan keluarga di masa pandemi covid-19	Ketersediaan pangan keluarga terkait pandemi covid 19 tentang ketahanan pangan belum sepenuhnya tercukupi masih ada yang khawatir akan ketersediaan pangan di masa pandemik COVID-19 dan ada beberapa responden harus mengurangi pangan keluarga akibat dari pandemi covid 19.

4	Ahmad, D. N., Setyowati, L. (2021)	Ahmad, D. N., & Setyowati, L. (2021). Mengkenalkan Urban Farming pada Mahasiswa Untuk Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 dan Menambah Nilai Ekonomi. <i>Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA</i> , 4(1).	Urban Farming, Covid-19, Ketahanan Pangan	Urban farming Yang berarti bercocok tanam di lingkungan rumah perkotaan dianggap beriringan dengan keinginan masyarakat kota untuk menjalani gaya hidup sehat. Hasil panen dari urban farming lebih menyehatkan lantaran sepenuhnya menerapkan sistem penanaman organik, yang tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida sintesis. Urban farming merupakan strategi pemanfaatan lahan sempit untuk menghasilkan bahan makanan Segar sebagai upaya pemenuhan ketersediaan pangan perkotaan dan dapat meningkatkan akses Fisik karena sifatnya memperpendek proses distribusi dan dapat meningkatkan akses ekonomi rumah tangga melalui pendapatan rumah tangga.
---	------------------------------------	--	---	---

## 2.3 Kebijakan ( Regulasi )

### 1. Pengertian Kebijakan

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino: “Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>1</sup> Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Sedangkan menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).<sup>2</sup>

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 14: “Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah: “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kemabali oleh pemerintah Pasal 11 ayat 4 UU No.17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: “Belanja Negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam sejarah perkembangan APBN, klasifikasi belanja negara beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan, termasuk perubahan nomenklatur, dari pengeluaran negara menjadi belanja negara. Dalam periode 1969/1970- 1999/2000, pengeluaran negara dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi dan klasifikasi sektor. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, pengeluaran negara terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bungautang, subsidi daerah otonom, dan belanja lain-lain. Belanja lain-lain menampung antara lain alokasi subsidi pangan (subsidi beras dan subsidi impor gandum selama Pembangunan Jangka Panjang I) dan subsidi BBM (sejak tahun 1977/1978). Sementara itu, pengeluaran pembangunan terdiri atas pembiayaan rupiah yang berasal dari tabungan pemerintah dan pinjaman proyek. Tabungan pemerintah merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Pengeluaran pembangunan dikelompokkan lagi kedalam pengeluaran pembangunan untuk departemen/ lembaga, bantuan pembangunan daerah, dan pengeluaran pembangunan lainnya.

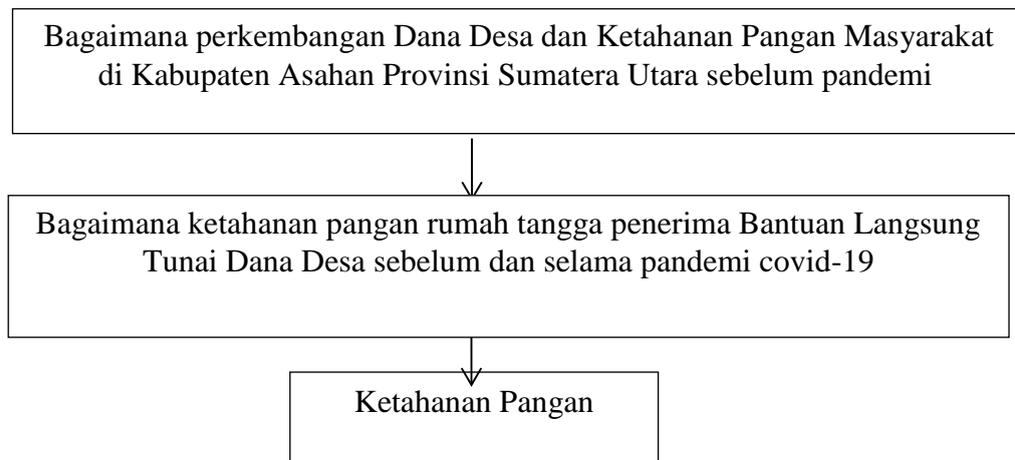
. Termasuk dalam pengeluaran pembangunan lainnya adalah subsidi pupuk. Disamping itu, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan juga dirinci menurut sektor subsektor. Mulai tahun 2001, sejalan dengan penyempurnaan disisi penerimaan, penyempurnaan, dan perubahan format juga dilakukan disisi belanja negara. Belanja negara, yang dalam format sebelumnya disebut dengan pengeluaran negara, diubah nomenklaturnya menjadi belanja negara. Dalam format yang baru, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan belanja kedaerah, untuk mengakomodasikan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sejak tahun 2005, rincian belanja negara mengalami perubahan. Belanja negara tetap terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer kedaerah. Namun, sesuai dengan pasal 11 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Belanja negara adalah seluruh kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara dapat dikelompokkan menjadi belanja Pemerintah Pusat dan transfer kedaerah. Belanja Pemerintah Pusat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional. Alasan utamanya adalah Pemerintah, melalui belanja Pemerintah Pusat, dapat secara langsung melakukan intervensi anggaran (*directbudgetintervention*) untuk mencapai sasaran-sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan. Sementara itu, transfer kedaerah diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik didaerah serta mengurangi ketimpangan pelayanan publik di

daerah. Hal ini tidak terlepas dari langkah- langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengantisipasi berbagai perkembangan di bidang ekonomi dan non ekonomi, di samping untuk mengimbangi dari semakin meningkatnya penerimaan negara secara nominal. Beban anggaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa kebijakan antara lain (Pasaribu, 2012).

- 1) Pertama, program penyehatan dan restrukturisasi perbankan yang dilakukan pada masa krisis ekonomi, sehingga pemerintah harus menerbitkan surat utang dan obligasi yang mengakibatkan kepada timbulnya beban bunga utang dalam negeri yang cukup besar.yang terasa sampai beberapa tahun terakhir.
- 2) Kedua, pemberian subsidi untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi dampak krisis ekonomi akibat masih rendahnya pendapatan riil masyarakat, misalnya pemberian bantuan langsung tunai (BLT).
- 3) Ketiga, pemberian stimulus kepada pemulihan ekonomi melalui peningkatan anggaran belanja pembangunan pemerintah, akibat dari masih lemahnya peranan swasta dalam menggerakkan laju perekonomian sejak krisis ekonomi tahun 1997.
- 4) Keempat, implikasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga melalui APBN, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran belanja untuk daerah dalam jumlah yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

## 2.4 Kerangka Konseptual

Dana Desa merupakan alokasi anggaran pemerintah yang di berikan melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa. Salah satu anggarannya ialah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan salah satu kegiatan pemberian bantuan langsung yang bersumber dari Dana Desa kepada penerima keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh langsung dari observasi lapangan di tempat penelitian, dan data sekunder di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

#### 3.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan acuan dari landasan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Dana Desa	alokasi anggaran pemerintah yang di berikan melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota.	Kementrian Keuangan <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Alokasi Anggaran yang diberikan kepada desa	Kementrian Keuangan <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>
Ketahanan pangan	Kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam dan bergizi. Sehingga Rumah Tangga tidak berada dalam kondisi kelaparan	Badan Pusat Statistik (BPS) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.3.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

#### **3.3.2 Waktu Penelitian**

Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.

### **3.4 Jenis Data**

#### **3.4.1 Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro, 2013).

#### **3.4.2 Sekunder**

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013).

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Menurut Kuncoro (2013) bahwa populasi adalah Wilayah Generalisasi terdiri objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah masyarakat yang berada di Desa Simpang Empat kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

#### **3.5.2 Sampel**

Menurut Kuncoro (2013), sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Jumlah populasi sebanyak 60 penerima BLT Dana Desa, rumus untuk menentukan sampel yaitu menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

**Gambar 3.1**

**Rumus Slovin. Keterangan:**

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan (*error tolerance*) e = 5% (0,5)

**Maka:**

$$n = \frac{60}{1 + 60(5)^2} = 52$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka peneliti menetapkan anggota sampel yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 52 penerima BLT Dana Desa

**3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan observasi langsung kelapangan, melakukan wawancara, dokumentasi terhadap masyarakat yang berada di desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

**3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis. Keseluruhan data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis menggunakan teknik seperti berikut :

### 3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan mengenai evaluasi kebijakan Dana Desa terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat yang meliputi, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Kemiskinan di era pandemi covid-19. Dan juga mengenai pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada masyarakat.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Asahan

##### 4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Asahan berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Terletak pada garis

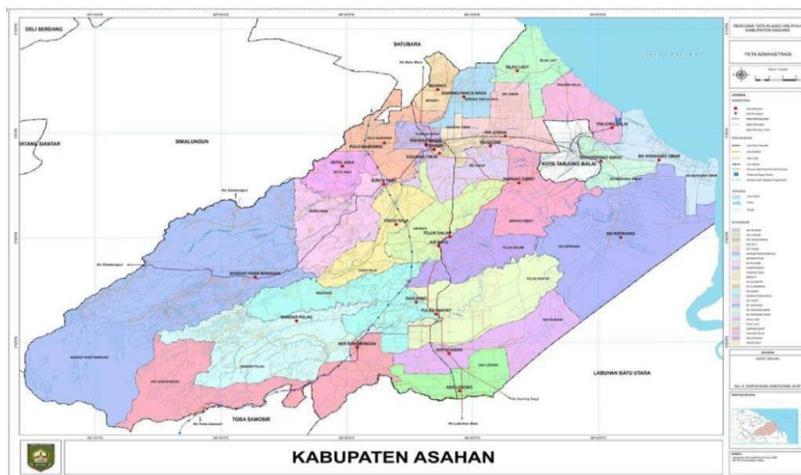
Terletak pada garis  $2^{\circ}30'00''$ - $3^{\circ}10'00''$  Lintang Utara,  $99^{\circ}01'$ - $100^{\circ}00'$

Bujur Timur dengan ketinggian 0–1.000 m diatas permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Asahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batu Bara,
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Labuhan batu Utara dan Kabupaten Toba Samosir,
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

#### Gambar 4.1 Peta Kabupaten Asahan



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020 ([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id))

Kabupaten Asahan menempati area seluas 3.732,97 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 25 Kecamatan, 204 Desa/Kelurahan Definitif. Kecamatan Banda Pasir Mandoge merupakan Kecamatan yang terluas, dengan luasnya sebesar 713,63 km<sup>2</sup> atau sekitar 19,11 % dari total luas Asahan, diikuti Kecamatan Sei Kepayang dengan luas 370,69 km<sup>2</sup> atau 9,93 %. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Kisaran Timur dengan luas 30,16 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,80% dari total luas wilayah Kabupaten Asahan.

**Tabel 4.1**

**Nama, Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten Asahan**

No.	Kecamatan	Luas	Persentase (%)
1	Bandar Pasir Mandoge	713,6321	19,11
2	Bandar Pulau	268,4124	7,19
3	Aek Songsongan	282,2056	7,55
4	Rahuning	195,7978	5,24
5	Pulau Rakyat	213,6475	5,72
6	Aek Kuasan	143,1331	3,83
7	Aek Ledong	85,1169	2,27
8	Sei Kepayang	370,6919	9,93
9	Sei Kepayang Barat	49,1921	1,31
10	Sei Kepayang Timur	100,6452	2,69
11	Tanjung Balai	88,6836	2,37
12	Simpang Empat	135,7699	3,63
13	Teluk Dalam	117,0128	3,13
14	Air Batu	117,1454	3,13
15	Sei Dadap	82,7819	2,21

16	Buntu Pane	153,3986	4,10
17	Tinggi Raja	107,8977	2,89
18	Setia Janji	62,3702	1,67
19	Meranti	45,3276	1,21
20	Pulo Bandring	86,9936	2,33
21	Rawang Panca Arga	67,3702	1,80
22	Air Joman	98,0944	2,62
23	Silo Laut	84,6758	2,26
24	Kisaran Barat	32,8052	0,87
25	Kisaran Timur	30,1678	0,80

*Sumber : Badan Pusat Statistik Asahan 2020*

Berdasarkan luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang luas terbesar adalah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dengan luas 713,6321 km<sup>2</sup> atau sekitar 19,11 persen dari total luas Kabupaten Asahan, diikuti Kecamatan Sei Kepayang dengan luas 370,6919 Km<sup>2</sup> atau 9,93 persen. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kisaran Timur dengan luas 30,1678km<sup>2</sup> atau sekitar 0,80persen dan diikuti oleh Kecamatan Kisaran Barat dengan 32,8052 0,87 persen dari total luas wilayah Kabupaten Asahan. Dari 25 kecamatan di Kabupaten Asahan, Kecamatan Simpang Empat memiliki luas yaitu 135,7699 km<sup>2</sup> dengan persentase sebesar 3,63 persen dari total keseluruhan artinya luas wilayah Kecamatan Simpang Empat termasuk dalam kategori wilayah sedang jika dibandingkan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Kisaran Barat. Rata-rata luas wilayah di Kecamatan Simpang Empat dimanfaatkan untuk bertani oleh masyarakat.

## **4.1.2 Kondisi Iklim dan Topografi**

### **A. Iklim**

Kabupaten Asahan termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim hujan pada bulan November sampai bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

Menurut catatan Stasiun Klimatologi PTPN III Kebun Sei Dadap, pada tahun 2016 terdapat 119 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 2.070mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Februari yaitu 273 mm dengan hari hujan sebanyak 11 hari. Sedangkan curah hujan paling kecil terjadi pada bulan April sebesar 51 mm dengan hari hujan sebanyak 4 hari. Rata-rata curah hujan tahun 2016 mencapai 172,5 mm/bulan.

### **B. Topografi**

Kondisi topografi di Kabupaten Asahan sebagian besar berupa dataran rendah dengan ketinggian yang relatif bervariasi berkisar antara 0-1000 meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan daerah tertinggi di Kabupaten Asahan dengan ketinggian mencapai 173 m dpl sedangkan wilayah Kecamatan Sei Kepayang Barat merupakan daerah terendah dengan ketinggian sekitar 2 mdpl. Ketinggian wilayah setiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tinggi Wilayah Kecamatan di Kkabupaten Asahan**

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Bandar Pasir Mandoge	173
2	Bandar Pulau	60
3	Aek Songsongan	51
4	Rahuning	38
5	Pulau Rakyat	20
6	Aek Kuasan	36
7	Aek Ledong	26
8	Sei Kepayang	4
9	Sei Kepayang Barat	2
10	Sei Kepayang Timur	7
11	Tanjung Balai	4
12	Simpang Empat	9
13	Teluk Dalam	31
14	Air Batu	12
15	Sei Dadap	9
16	Buntu Pane	65
17	Tinggi Raja	50
18	Setia Janji	47
19	Meranti	10
20	Pulo Bandring	6
21	Rawang Panca Arga	10
22	Air Joman	6
23	Silo Laut	6
24	Kisaran Barat	25
25	Kisaran Timur	23

Untuk Kondisi Topografi di Kabupaten Asahan, Kecamatan Simpang Empat memiliki tinggi daerah diatas permukaan laut sebesar 9mdpl, artinya Kecamatan Simpang Empat berada dipinggiran laut. Laut di Kecamatan Simpang Empat berada di Kecamatan Air Joman dan Kota Tanjung Balai. Sehingga aktivitas ekonomi masyarakat Kecamatan Simpang Empat sebagian adalah nelayan dan pedagang.

### 4.1.3 Kondisi Demografi

#### A. Penduduk

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Asahan (jiwa), 2020**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	B.Pmandoge	17729	17268	34997
2	Bandar Pulau	12152	11532	23684
3	Aekongsongan	9077	8893	17970
4	Rahuning	10123	9817	19940
5	Pulau Rakyat	17762	17692	35454
6	Aek Kuasan	13082	12660	25742
7	Aek Ledong	10480	10152	20632
8	Sei Kepayang	9806	9500	19306
9	epayang Barat	7561	7345	14906
10	Kepayang Timur	4913	4648	9561
11	Tanjung Balai	21259	20185	41444
12	Simpang Empat	23679	22963	46642
13	Teluk Dalam	9706	9537	19243
14	Air Batu	23229	22639	45868
15	Sei Dadap	18409	17713	36122
16	Buntu Pane	12308	12363	24671
17	Tinggi Raja	10160	9896	20056
18	Setia Janji	6425	6359	12784
19	Meranti	11770	11738	23508
20	Pulo Bandring	17059	16410	33469
21	ang Panca Arga	10090	9857	19947
22	Air Joman	29111	28016	57127
23	Silau Laut	12733	12239	24972
24	Kisaran Barat	30221	30207	60428
25	Kisaran Timur	40547	40940	81487
	Asahan	389391	380569	769960

Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan([www.bpsasahan.go.id](http://www.bpsasahan.go.id) )

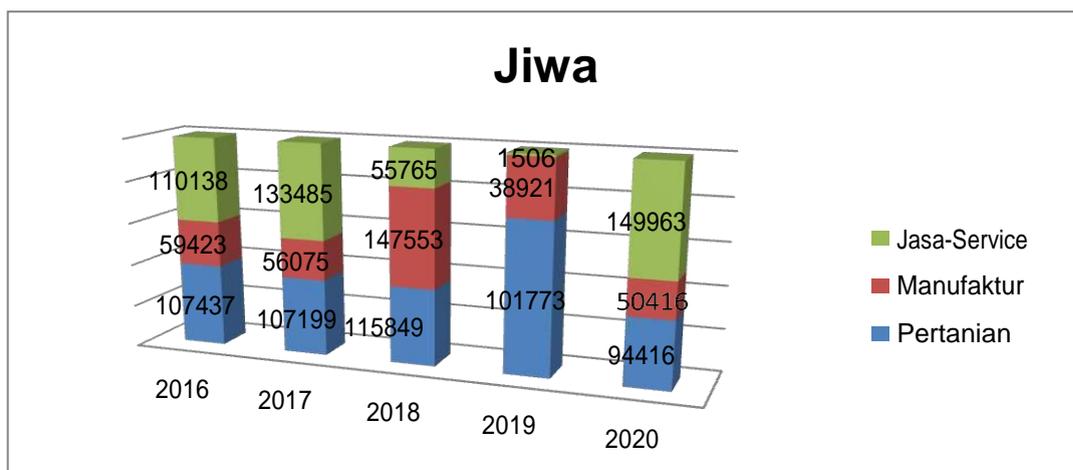
Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Asahan pada tahun 2020 tercatat 389.391 jiwa dengan rincian 380.569 jiwa penduduk laki-laki dan 769.960 jiwa penduduk perempuan. Maka diatas bahwa Kecamatan yang paling banyak jumlahnya adalah Kecamatan kisan

Timur dengan jumlah penduduknya 81.487 jiwa. Dan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Sei Kepayang Timur dengan 9.561 jiwa. Kecamatan Simpang Empat memiliki jumlah penduduk yaitu 46642 dengan rincian jumlah penduduk laki-laki yaitu 23679 dan jumlah penduduk perempuan yaitu 22963 sehingga terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan melalui setiap kecamatan, terlihat Kecamatan Simpang Empat memiliki jumlah penduduk yang sedang atau tidak terlalu padat.

## B. Tenaga Kerja

**Grafik 4.1**

**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Asahan, 2016-2020**



Dapat dilihat pada Grafik 4.1 persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu yang paling banyak adalah dibidang pertanian. Tetapi jika dilihat dari tahun pertahun jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian meningkat di tahun 2016 – 2019. Pada tahun 2016 jumlah pekerja dibidang pertanian sebesar 107.437 jiwa, dan pada tahun 2019 pekerja dibidang pertanian sebesar 101.771 jiwa, akan tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk yang bekerja dibidang pertanian mengalami penurunan sebesar 94.416

jiwa. Hal ini disebabkan karena lahan yang berkurang dan turunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian karena produktivitas yang mengalami peningkatan. Jika produktivitas meningkat, maka tenaga manusia akan digantikan dengan mesin sehingga otomatis akan mengurangi tenaga kerja.

Jika dilihat dari bidang industri manufaktur dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun . Pada tahun 2018 jumlah pekerja dibidang industri manufaktur tertinggi sebesar 147.553 jiwa dan mengalami penurunan drastis di tahun 2019 sebesar 38.921 jiwa , kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 50.416 jiwa. Hal ini disebabkan peningkatan pengolahan sumber daya alam dan tingginya permintaan ekspor. Melihat tingginya permintaan produksi dari sisi pasar yaitu peningkatan ekspor minyak kelapa sawit mentah dan bahan pangan, sehingga industri manufaktur banyak menerima pekerja.

Pada bidang jasa- jasa pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2016 jumlah tenaga kerja dibidang jasa-jasa sebesar 110.138 jiwa dan mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 133.485 jiwa. Tetapi pada tahun 2018 jumlah penduduk yang bekerja di bidang jasa – jasa mengalami penurunan sebesar 55.765 jiwa dan kembali mengalami penurunan drastis di tahun 2019 sebesar 1506 jiwa kemudian mengalami kenaikan drastis pada tahun 2020 yaitu sebesar 149.963 jiwa. Hal ini disebabkan sektor jasa menjadi sumber utama pekerjaan masyarakat melalui industri jasa, seperti pariwisata, logistik dan transportasi.

#### **4.1.4 Kondisi Ekonomi Kabupaten Asahan**

Kondisi ekonomi masyarakat dilihat dari nilai PDRB dan PDRB PerKapita

yang merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dan PDRB PerKapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah.

#### A. Nilai PDRB

Potensi ekonomi sangat penting pada pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di Kabupaten Asahan, caranya dengan distribusi yang mendominasi di wilayah/daerah tersebut dan mengembangkan untuk mendorong ditribusi yang lain agar terdorong maju dan berkembang dengan tujuan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkelanjutan. Secara umum terdapat empat sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Asahan yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan, jasa dan hotel. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah untuk mengatur dan mengelola dengan mengembangkan distribusi tersebut. Untuk melihat perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB dari segi lapangan usaha yang mendominasi.

**Tabel 4.4**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Asahan (miliar rupiah) 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	9463,53	9957,32	10558,75	11169,16	11365,53
2	Pertambangan dan Penggalian	44,34	47,11	50,03	52,97	52,37
3	Industri Pengolahan	4729,62	4958,87	5155,37	5361,63	5401,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21,52	22,96	23,92	24,76	26,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	12,48	13,27	13,47	14,31	14,81
6	Konstruksi	1415,10	1489,21	1570,83	1667,39	1568,04

7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3766,58	4013,88	4281,48	4576,02	4525,59
8	Transportasi dan Pergudangan	750,21	816,16	854,50	912,71	874,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	182,76	194,89	207,02	220,81	207,96
10	Informasi dan Komunukasi	109,33	117,01	125,30	135,41	146,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	330,41	339,47	352,07	362,76	364,13
12	Real estate	355,08	379,68	402,83	424,30	435,11
13	Jasa Perusahaan	9,07	9,65	10,15	10,67	10,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	675,90	701,47	744,73	791,26	788,17
15	Jasa pendidikan	187,88	197,71	210,17	218,94	220,98
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	133,61	143,00	151,81	159,42	159,04
17	Jasa Lainnya	115,30	123,67	132,43	142,74	138,81
	PDRB ADHK	22302,70	23525,35	24844,87	26245,24	26299,57

Sumber:Badan Pusat Statistik([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Tabel 4.4 menggambarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Asahan menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2020 . Berdasarkan Tabel diatas selama kurun waktu tahun 2016-2020 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang paling dominan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi hampir setengah dari total keseluruhan PDRB di Kabupaten Asahan, dan setiap tahunnya sektor ini terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Asahan. Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 9463,53 miliar , mengalami peningkatan menjadi Rp. 9957,32 miliar di tahun 2017. Pada tahun 2018 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp10558,75 miliar, meningkat menjadi Rp. 11169,16 miliar di tahun 2019 dan pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan kembali sebesar Rp11365,53 miliar. Tingginya kontribusi sektor

pertanian di Kabupaten Asahan karena berdasarkan topografi wilayahnya dan daerah potensial dijadikan sebagai tanah pertanian dan perkebunan. Kemudian sektor pertanian di Kabupaten Asahan juga memenuhi kebutuhan di Kabupaten dan daerah lainnya sehingga komoditas sektor pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman bahan pangan (padi,jagung,ubi,kacangtanahdll) serta sektor perkebunan (karet,kelapa sawit,kakao,dll) adalah komoditas andalan yang untuk diekspor. Dari 25 kecamatan di Kabupaten Asahan salah satu kecamatan penghasil pertanian dan perkebunan adalah Kecamatan Simpang Empat.

Sektor lain yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Asahan adalah sektor industri pengolahan, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang lumayan meningkat dari tahun 2016-2020 setelah sektor pertanian,kehutanan,dan perikanan. Pada tahun 2016 sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp. 4729,62 miliar terhadap PDRB Kabupaten Asahan, meningkat menjadi Rp4958,87 miliar di tahun 2017. Pada tahun 2018 sektor industri pengolahan sebesar Rp. 5155,37 miliar, meningkat sebesar Rp5361,63 miliar di tahun 2018, dan di tahun 2020 sektor industri pengolahan masih mengalami kenaikan sebesar Rp5401,35 miliar. Hal ini disebabkan tingginya permintaan akan pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Di Kabupaten Asahan sektor Industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan,unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan,perikanan dan pertambangan atau penggalian. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik,mesin,atau peralatan khusus.

Selanjutnya sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar

terhadap total PDRB Kabupaten Asahan adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini disebabkan lapangan usaha dibidang perdagangan besar dan eceran memberikan imbalan tinggi terhadap PDRB Kabupaten Asahan sehingga membutuhkan pekerja melalui sektor tersebut. Baik penjualan grosir maupun eceran begitu juga dengan reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara itu, sektor lain di luar dari ke empat sektor yang telah disebutkan di atas mempunyai kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB Kabupaten Asahan.

### **B. PDRB Perkapita**

Pertumbuhan PDRB suatu daerah dapat disebabkan dari meningkatnya kontribusi salah satu subsektor yang ada pada daerah tersebut. Berikut tabel PDRB PerKapita Kabupaten Asahan Atas Harga Konstan

**Tabel 4.5**

**PDRB PerKapita Kabupaten Asahan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2019(riburupiah)**

Tahun	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan(%)
2017	32.732,373	5,48
2018	34.298,17	5,61
2019	35.962,48	5,64

*Sumber:Badan Pusat Statistik([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))*

PDRB PerKapita Kabupaten Asahan atas dasar harga konstan, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2017 PDRB PerKapita Kabupaten Asahan atas dasar harga konstan mencapai Rp 32,73 juta rupiah. Pada tahun 2018 yaitu Rp 34,30 juta rupiah, pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 5,61%. Dan ditahun 2019 PDRB PerKapita Kabupaten Asahan yaitu 35,96

dengan pertumbuhan sebesar 5,64%.

#### 4.1.5 Kondisi Sosial Kabupaten Asahan

Pada umumnya masyarakat tidak terlepas dari kegiatan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, hal ini menjadi penentu bagaimana kondisi sosial disuatu daerah. Kondisi sosial merupakan keadaan yang berkaitan dengan situasi dalam masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk melihat kondisi soaial suatu daerah, dimana IPM Kabupaten Asahan mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup,kesehatan, dan hidup layak melalui kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Sehingga berpengaruh pada tingkat kemiskinan di suatu daerah, keberadaan penduduk miskin dalam suatu wilayah tidak akan membawa kemakmuran bagi wilayah tersebut. Sehingga untuk melihat kondisi sosial di Kabupaten Asahan melalui.

##### A.Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

**Tabel 4.5**  
**Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020**

<b>Komponen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Umur Harapan saat Lahir (tahun)	67,47	67,57	67,79	68,11	68,26
HarapanLama Sekolah (tahun)	12,52	12,53	12,56	12,59	12,60
Rata-RataLama Sekolah(tahun)	8,33	8,46	8,47	8,49	8,79
Pengeluaran Perkapita(%)	10.288	10.477	10.735	10.983	10.890
IPM	68,71	69,10	69,49	69,92	70,29
Pertumbuhan IPM	0,45	0,57	0,56	0,62	0,53

Sumber:Badan Pusat Statistik([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id))

Berdasarkan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Asahan Pada tahun 2016 - 2020, dari tahun ke tahun angka harapan hidup selalu mengalami peningkatan seperti dari tahun 2016 sebesar 67,47 tahun menjadi sebesar 67,57 tahun pada tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2018 yaitu sebesar 67,79 tahun. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk rata-rata lama sekolah di Kabupaten Asahan mengalami kenaikan disetiap tahunnya, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Asahan cukup rendah yaitu pada tahun 2016 hanya 8,33 tahun . Berarti pada tahun 2020, rata – rata penduduk Kabupaten Asahan yang berusia 25 tahun ke atas hanya mengecap bangku pendidikan formal selama 8,79 tahun. IPM menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah, untuk IPM Kabupaten Asahan peningkatannya cukup signifikan pada tahun 2016 hanya sebesar 68,71 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 70,29.

### B. Kemiskinan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan ([www.Bpsasahan.go.id](http://www.Bpsasahan.go.id))

Dari data jumlah persentase penduduk miskin Kabupaten Asahan tahun 2014-2018. Dapat dilihat jumlah dan persentase penduduk miskin di kabupaten Asahan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu

ditahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Asahan yaitu sebesar 8.367.000 jiwa dengan persentase 11,67%. Ditahun 2018 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang menjadi 7.414.000 jiwa dengan persentase menjadi 10,25%. Dan ditahun 2019 terus mengalami penurunan menjadi 7.053.000 jiwa dengan persentase 9,68%.

#### **4.2 Perkembangan Dana Desa Kabupaten Asahan Sebelum Pandemi**

Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

**Grafik 4.2**  
**Perkembangan Dana Desa Kabupaten Asahan Sebelum Pandemi**



Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia ([www.kemkeu.go.id](http://www.kemkeu.go.id))

Berdasarkan grafik diatas, dana desa di kabupaten Asahan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015 Dana Desa Kabupaten Asahan sebesar 12.726.298 juta mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2016 yaitu 111.404.032 juta. Pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan yaitu 141.972.561 juta. Pada tahun 2018 Dana Desa di Kabupaten Asahan mengalami penurunan yaitu 126.570.894 juta. Kembali mengalami kenaikan di tahun 2019 yaitu 146.090.415 juta. Dana desa di kabupaten Asahan yang paling sedikit yaitu di tahun 2015 dan yang paling tinggi di tahun 2019.

Pembangunan Perdesaan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan . Sesuai dengan Nawacita butir ketiga yakni ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan

Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan' diwujudkan dalam berbagai pendekatan mengatasi ketimpangan. Maka Kebijakan Dana Desa diharapkan mampu mendongkrak perekonomian di daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi di wilayah pedesaan. Membangun dari desa adalah salah satu komitmen Pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

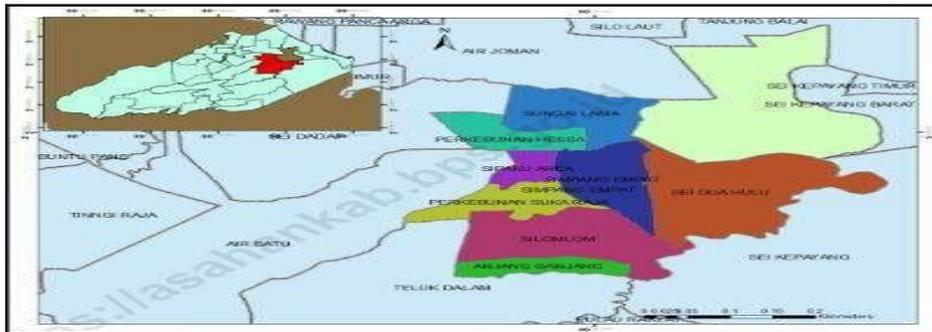
### **4.3 Gambaran Umum Kecamatan Simpang Empat**

#### **4.3.1 Letak Geografis**

Kecamatan Simpang Empat berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Terletak pada garis 283389-83383 Lintang Utara ,993387-995021 Bujur Timur dengan ketinggian 2-24m diatas permukaan laut. Kecamatan Simpang Empat menempati area seluas 135,7699km<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Simpang Empat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Air joman
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Dalam
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Air Batu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tanjungbalai

**Gambar 4.2**  
**Peta Kecamatan Simpang Empat**



Sumber: Badan Pusat Statistik Asahan ([www.Bpsasahan.go.id](http://www.Bpsasahan.go.id))

Kecamatan Simpang Empat memiliki delapan desa dan 73 dusun. Berikut merupakan luas wilayah menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat.

**Tabel 4.6**  
**Luas Menurut Desa Di Kecamatan Simpang Empat**

Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
Silomlom	22,50	16,12
Perkebunan Sukaraja	9,72	6,96
Simpang Empat	17,70	12,68
Sei Dua Hulu	41,80	29,92
Perkebunan Hesa	16,30	11,68
Sungai Lama	14,00	10,03
Sipaku Area	8,82	6,32
Anjung Ganjang	8,75	6,27

*Sumber: BPS, Asahan 2020*

Berdasarkan luas wilayah menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang luas terbesar adalah desa Sei dua hulu dengan luas 41,80 atau sekitar 29,92 persen dari total luas Kecamatan Simpang Empat, diikuti Desa Simpang Empat dengan luas 17,70

Km2 atau 12,68 persen. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Desa Sipaku Area dengan luas 8,82 km2 atau sekitar 6,32 persen dan diikuti oleh Desa Anjung Ganjang dengan luas 8,75 atau 6,27persen dari total luas wilayah Kecamatan Simpang Empat.

#### 4.3.2 Kodisi Iklim dan Topografi

##### A. Iklim

Kecamatan Simpang Empat termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan juni sampai september dan musim hujan pada bulan november sampai bulan maret . diantara kedua musim itu diselingi musim pancaroba.

#### 4.3.3 Kondisi Demografi

##### A. Penduduk

**Tabel 4.7**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Desa di Kecamatan Simpang Empat Tahun 2019**

<b>D e s a</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Rasio Jenis Kelamin</b>
Silomlom	1 714	1 708	3 422	100,35
Perk Sukaraja	689	657	1 346	104,87
Simpang Empat	7 216	7 059	14 275	102,22
Sei Dua Hulu	2 740	2 640	5 380	103,79

Perk Hessa	972	933	1 905	104,18
Sungai Lama	4 127	4 088	8 215	100,95
Sipaku Area	3 337	3 306	6 643	100,94
Anjung Ganjang	942	921	1 863	102,28
Total	21 737	21 312	43 049	101,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Asahan ([www.bpsasahan.go.id](http://www.bpsasahan.go.id))

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Simpang Empat pada tahun 2019 tercatat 43.049 jiwa dengan rincian 21/737 jiwa penduduk laki-laki dan 21.312 jiwa penduduk perempuan. Dan jumlah penduduk yang paling banyak penduduknya terdapat di Desa Simpang Empat yaitu 14.275 jiwa dan yang paling sedikit di Desa Anjung Ganjang yaitu hanya sebesar 1.863 jiwa.

#### 4.3.4 Kondisi Sosial Ekonomi Desa Simpang Empat

Desa simpang Empat merupakan salah satu desa di Kecamatan Simpang Empat yang memiliki luas wilayah sebesar 17,70 Km<sup>2</sup> atau 12,68 persen artinya desa simpang empat adalah desa yang paling luas jika dilihat dari luas wilayah keseluruhan desa di Kecamatan Simpang Empat. Sehingga aktivitas ekonomi masyarakat di desa Simpang Empat adalah petani dan wiraswasta. Desa Simpang Empat juga memiliki jumlah penduduk yang banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di desa lainnya di Kecamatan Simpang Empat yaitu 14 275 jiwa. Desa Simpang Empat Pada saat ini kedudukan desa sebagai subjek pembangunan sehingga harus dilakukan pemerataan alasannya karena untuk penciptaan stabilitas pembangunan di pedesaan. Desa memiliki hak dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan kesejahteraan. Melalui Dana Desa diharapkan mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara intensif dan efektif. Pembangunan pedesaan dilakukan guna untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan peningkatan perekonomian di desa.

#### **4.4 Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan Rumah Tangga**

##### **4.4.1 Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan Rumah Tangga Desa Simpang Empat**

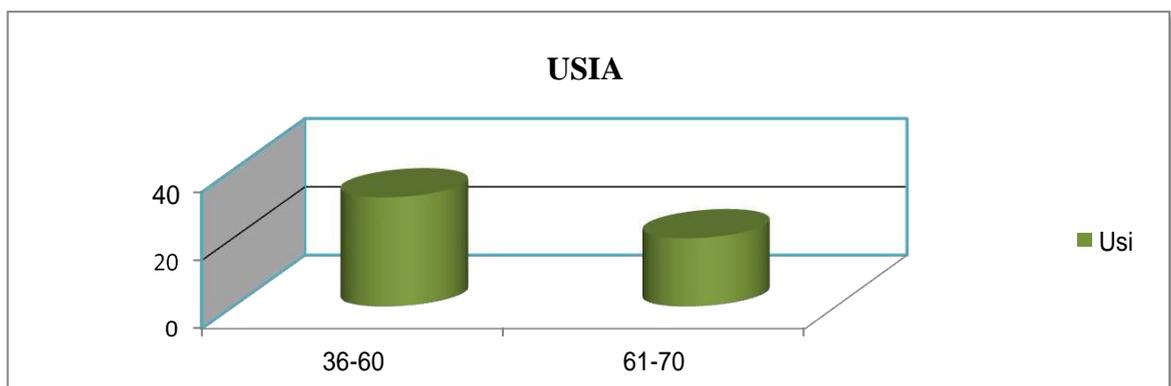
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.18 tahun 2012 tentang pangan, bahwa ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam dan bergizi, merata dan terjangkau untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Kemampuan setiap rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup bagi masing-masing anggotanya untuk sehat dan produktif sehingga untuk pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi usaha pangan dan sarana produksi pangan. Dengan demikian hal-hal yang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan pangan yaitu tersedianya pangan, lapangan kerja, dan pendapatan sebagai penentu suatu rumah tangga dapat memenuhi ketahanan pangan dan gizi bagi setiap anggota keluarganya.

Ketahanan pangan dan gizi pada dasarnya terbagi menjadi ketersediaan pangan (*food availability*), konsumsi pangan (*food consumption*) dan keterjangkauan pangan (*food accessibility*). Ketersediaan pangan yang cukup berarti rata-rata jumlah dan mutu gizi pangan yang tersedia di masyarakat dan pasar mencukupi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Apabila tubuh kekurangan zat gizi, khususnya energi dan protein dalam jangka waktu tertentu akan berdampak pada menurunnya produktivitas kerja. Situasi pangan dan gizi di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan menyimpulkan bahwa ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein secara kuantitas menunjukkan keadaan lebih dari cukup dan sarana dan prasarana ketahanan pangan sudah mendukung. Melihat dari kativitas ekonomi masyarakat di desa Simpang Empat adalah petani. Namun tingkat ekonomi masyarakat rumah tangga yang masih dibawah rata-rata menjadi kendala dalam penemuan kebutuhan pangan. Di desa Simpang Empat masih terdapat masyarakat miskin sehingga dalam pemenuhan kebutuhan pangan masi terkendala. SeHINGA pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan mereka.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin didesa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diharapkan dapat membantu masyarakat yang terkena dampak covid terutama penduduk miskin yang terdampak karena pandemi yang tidak mmapu membeli kebutuhan rumah tangga yang layak dan meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga agar dapat

bertahan hidup selama pandemi. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan kepada 60 masyarakat di Desa Simpang Empat dengan kriteria masyarakat miskin dan terdampak covid-19, masyarakat yang memiliki sakit kronis/menaun, dan masyarakat yang tidak menerima bantuan selain dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Empat mengetahui informasi serta cara mendaftar untuk memperoleh bantuan melalui Kepala Dusun di desa. Kepala dusun desa Simpang Empat meminta KK penerima bantuan. Masyarakat juga mengetahui adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan selama melakukan pembagian bantuan masyarakat menerima pelayanan yang baik. Anggaran dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp.3.600.000/tahun. Penyaluran bantuan dilakukan setiap bulan dengan jumlah Rp.300.000.

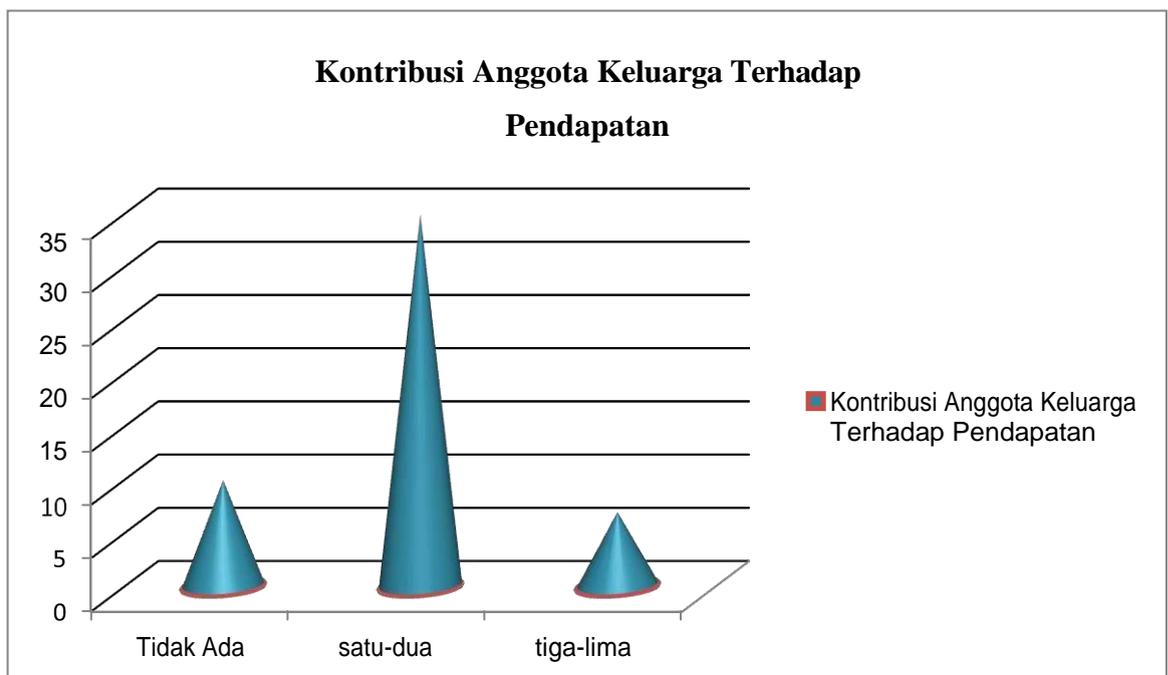
Untuk itu dilakukan riset dengan mengambil sampel sebanyak 52 Responden untuk melihat bagaimana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Ketahanan Pangan Masyarakat di Desa Simpang Empat. Berikut merupakan hasil penelitian mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Simpang Empat



Dari grafik diatas, penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa

Simpang Empat dengan 52 masyarakat penerima, usia penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa paling banyak di usia 36-60 tahun yaitu 32 responden, dan sebanyak 20 responden berusia 61-70 tahun. Artinya penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Simpang Empat mayoritasnya diperuntukkan kepada lansia.

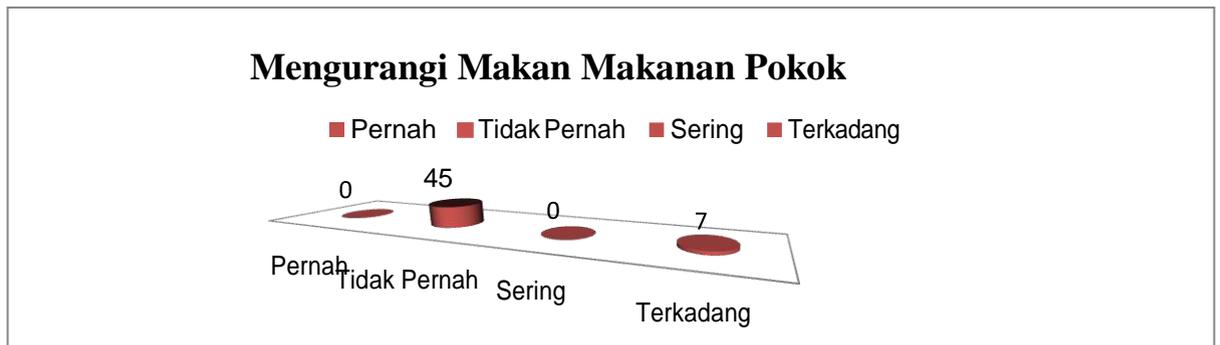
Dari data diatas,pekerjaan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa lebih tinggi pada wiraswasta yaitu 32 responden , kemudian pada petani sebesar 20 responden. Sesuai dengan aktivitas ekonomi masyarakat di desa Simpang Empat yaitu wiraswasta dan petani dengan meligat kondisi topografi dan luas lahan yang digunakan masyarakat desa Simpang Empat.



Dari grfaik diatas, penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Simpang Empat dengan 52 masyarakat ,kontribusi anggota keluarga terhadap pendapatan rumah tangga paling tinggi satu hingga dua anggota keluarga yaitu 35

responden, artinya dalam rumah tangga tersebut masih memiliki penambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, kemudian sebanyak 7 responden memiliki tiga hingga 5 anggota keluarga sebagai penambah pendapatan rumah tangga dan sebanyak 10 responden tidak memiliki kontribusi penambahan pendapatan dari anggota keluarga/

### Ketahanan Pangan Sebelum Pandemi Covid-19



Makanan pokok merupakan makanan yang menjadi gizi dasar yang harus dikonsumsi. Sehingga ketahanan pangan rumah tangga dipengaruhi oleh makanan pokoknya. Dari grafik diatas, masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa Simpang Empat dengan 52 masyarakat, sebanyak 45 responden merasa tidak pernah mengurangi makan makanan pokok, hal ini dapat dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat masih mencukupi dan sebanyak 7 responden merasa pernah mengurangi makan makanan pokok di era pandemi, hal ini dapat dikarenakan tingkat ekonomi rendah.

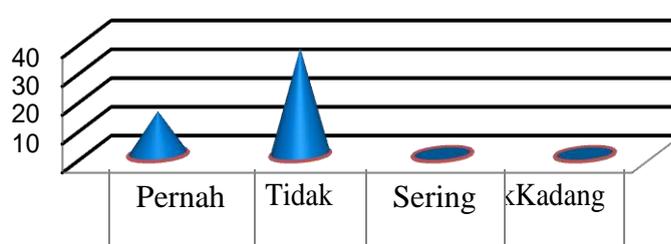
## Membeli Makanan Seimbang



Mengonsumsi pola makan yang seimbang merupakan sudah anjuran mendasar bagi semua orang. Dimana asupan zat gizi yang dikonsumsi menentukan aspek kesehatan nutrisi setiap individu. Makanan seimbang adalah makanan yang memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan asupan gizi yang dibutuhkan. Penting untuk diketahui, kebutuhan asupan gizi setiap orang berbeda-beda, tergantung dari jenis kelamin, usia, kapasitas aktifitas keseharian, dan lainnya

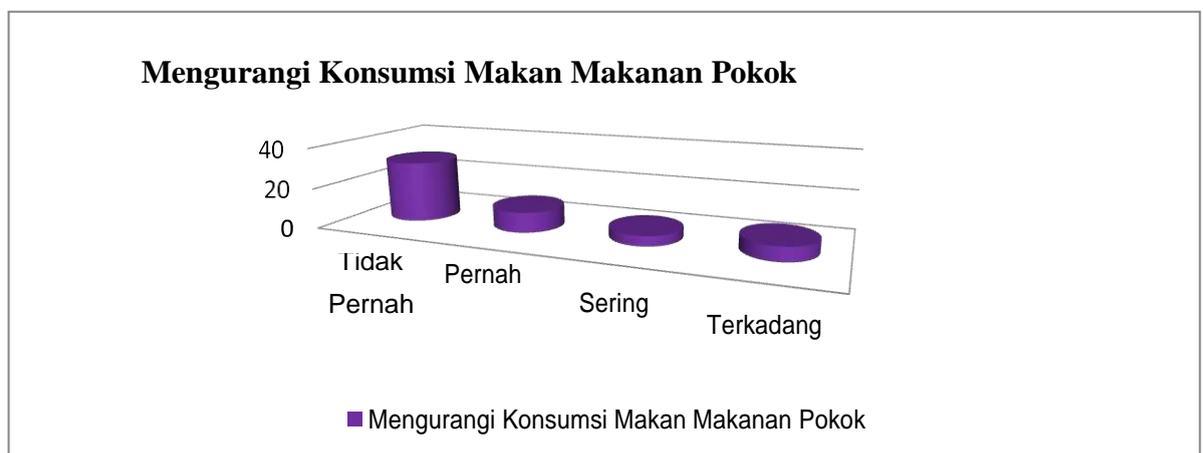
Dari grafik diatas, dalam membeli makanan seimbang di era pandemi melalui 52 masyarakat penenrima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sebanyak 45 masyarakat memilih sering membeli makanan seimbang, sebanyak 5 masyarakat memilih pernah dan paling sedikit 2 masyarakat memilih terkadang. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan makanan seimbang di Desa Simpang Empat terlihat sudah cukup baik. Hal ini dapat dikarenakan keadaan wilayah dan aktivitas ekonomi di Desa

## Penurunan Kesehatan



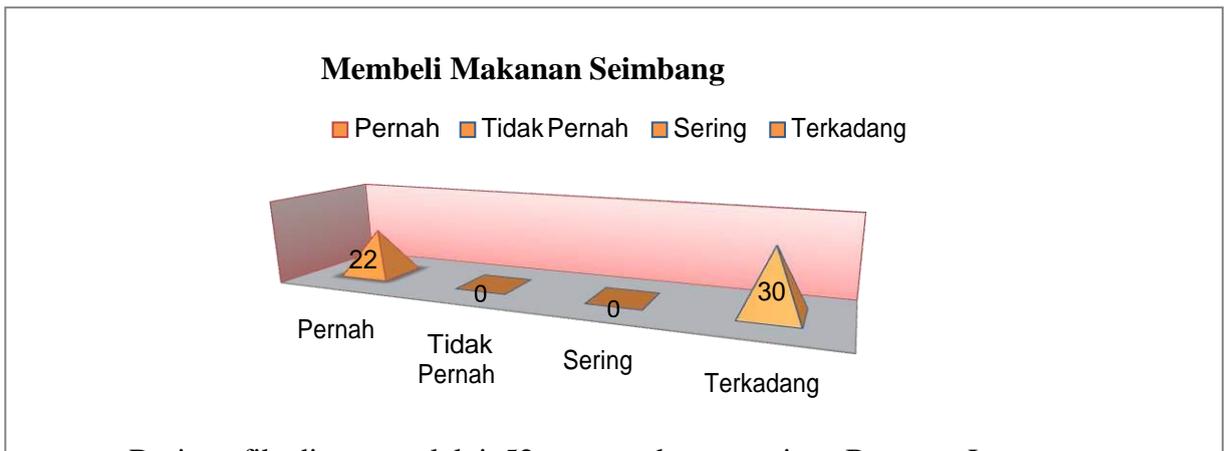
Dari grafik diatas, masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Simpang Empat dengan 52 masyarakat sebagai penerima bantuan. Paling tinggi memilih tidak pernah merasakan penurunan kesehatan akibat tidak terpenuhinya gizi yang baik yaitu sebanyak 37 masyarakat. Dan sebanyak 15 masyarakat merasa pernah merasakan penurunan kesehatan akibat tidak terpenuhinya gizi yang baik hal ini berhubungan dengan ekonomi masyarakat rendah sehingga dalam mencukupi pangan yang baik tidak dapat dilakukan.

### **Ketahanan Pangan Selama Pandemi Covid-19**



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan 52 masyarakat penerima bantuan ,masyarakat merasa tidak pernah mengurangi konsumsi makan makanan pokok selama pandemi yaitu 40. Seperti jumlah makan dalam satu hari,kemudian masyarakat merasa terkadang mengurangi konsumsi makan makanan pokok yaitu 7 masyarakat penerima bantuan. Hal ini dapat dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat menurun akibat pandemi. Kemudian sebanyak 5 memilih sering mengurangi makan makanan pokok di era pandemi. Dengan demikian pada saat pandemi masyarakat desa simpang empat rata-rata tidak mengurangi makan

makanan pokok. hal ini dapat dikarenakan adanya kontribusi pendapatan dalam rumah tangga sehingga tidak berpengaruh besar terhadap pengurangan konsumsi makanan pokok.



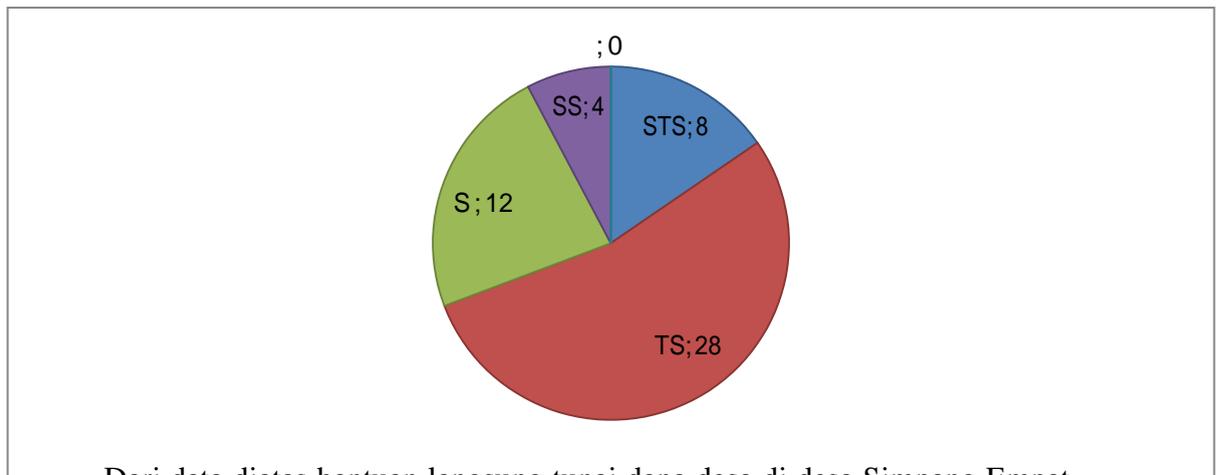
Dari grafik diatas ,melalui 52 masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Simpang Empat sebanyak 30 memilih terkadang membeli makanan seimbang pada saat pandemi, dan sebanyak 22 masyarakat memilih pernah membeli makanan seimbang selama pandemi. hal ini dikarenakan sebagian masyarakat yang menggunakan bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk membeli makanan seimbang dalam pemenuhan ketahanan pangan rumah tangga.



Berdasarkan grafik diatas, penurunan kesehatan akibat kekurangan gizi

dari 52 orang penerima bantuan langsung tunai dana desa ,paling tinggi memilih tidak pernah yaitu sebanyak 29 kemudian 10 lainnya memilih pernah merasakan penurunan kesehatan akibat kekurangan gizi hal ini dapat disebabkan penurunan pendapatan responden selama pandemi, kemudian sebanyak 2 masyarakat penerima bantuan memilih terkadang merasakan penurunan kesehatan.

### **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan**

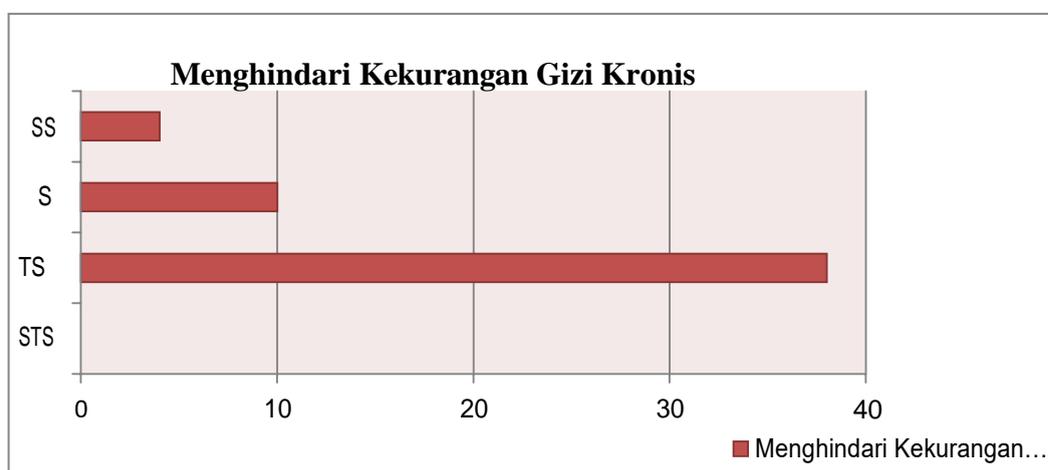


Dari data diatas bantuan langsung tunai dana desa di desa Simpang Empat

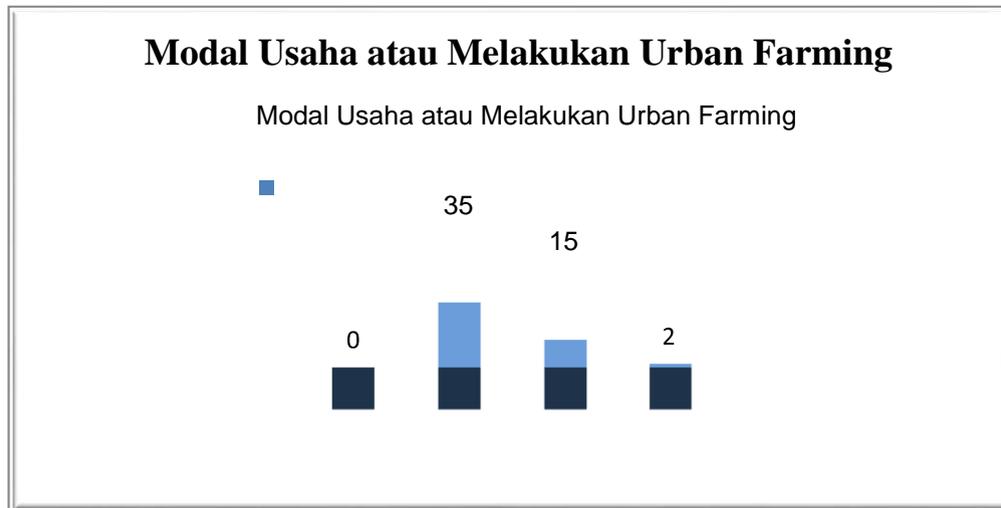
membantu rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan pangan dengan 52 masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa yang paling tinggi merasa tidak setuju yaitu 28, sebanyak 12 orang setuju, adapun masyarakat yang memilih sangat tidak setuju dan kemudian paling terendah memilih sangat setuju yaitu 4 orang. Bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan kepada masyarakat tidak begitu efektif dalam membantu mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga. Hal ini dapat dikarenakan masyarakat yang pendapatannya rendah kemudian merasakan dampak dari pandemi. namun ada beberapa masyarakat dengan tingkat pendapatan dan kontribusi pendapatan rumah tangga yang tinggi yang setuju adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa membantu mencukupi kebutuhan pangan



Dari data diatas dengan 52 masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Simpang Empat sebanyak 22 orang memilih sangat setuju dan 20 orang memilih setuju adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam mewujudkan rumah tangga tanpa kelaparan, seperti yang diketahui dampak dari pandemi banyak dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah, yang memiliki kontribusi pendapatan atau penambahan pendapatan dari anggota keluarga yang dibawah rata-rata atau cukup untuk mencukupi kebutuhan yang lain.

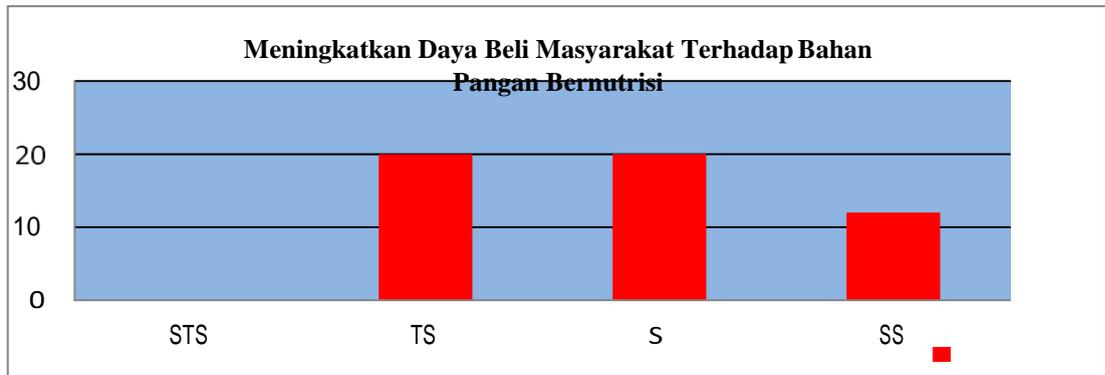


Dari data diatas, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menghindari kekurangan gizi kronis menurut masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa dengan 52 orang penerima , yang paling tinggi memilih tidak setuju yaitu 38 masyarakt ,kemudian yang menyatakan setuju sebanyak 10 orang dan yang memilih sangat setuju 4 orang.



Petani merupakan salah satu Aktvitas ekonomi masyarakat desa Simpang Empat yang dominan sehingga rata-rata masyarakat desa Simpang Empat memanfaatkan lahan mereka untuk bertani.

Dari grafik diatas, penerima bantuan langsung tunai dana desa dengan 52 penerima bantuan , yang menggunakan bantuan sebagai modal usaha atau urban farming, sebanyak 35 masyarakat memilih tidak setuju ,kemudian 15 masyarakat memilih setuju dan 2 orang lainnya memilih sangat setuju. Hal ini berarti masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa rata-rata tidak menggunakan bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan untuk modal usaha atau modal tani mereka.



Dari grafik diatas, dalam meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan bernutrisi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang memilih tidak setuju sebanyak 10 orang penerima bantuan, kemudian memilih setuju sebanyak 20 orang dan masyarakat yang merasa sangat setuju sebanyak 12 orang. Hal ini berarti masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa Simpang Empat rata-rata merasa adanya peningkatan daya beli bahan pangan bernutrisi rumah tangga melalui bantuan yang diberikan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan dana desa di kabupaten asahan sebelum pandemi covid-19 mengalami kenaikan hampir di setiap tahunnya, melalui data Dana Desa tahun 2015-2019. Peningkatan atau penambahan dana desa di kabupaten Asahan dilakukan untuk pengembangan potensi desa di Kabupaten Asahan seperti infrastruktur pedesaan, bangunan untuk mendukung perekonomian seperti pasar desa, irigasi. Sehingga pemanfaatan dana desa pada periode tahun 2015-2019 menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Asahan. Hal ini mengartikan bahwa perkembangan Dana Desa di Kabupaten Asahan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan sudah cukup baik.
2. Ketahanan pangan rumah tangga sebelum pandemi melalui hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa Simpang Empat dalam memenuhi pangan rumah tangga sudah cukup baik, hal ini dilihat dari pemenuhan kebutuhan pokok dan makanan seimbang untuk dikonsumsi sehingga tidak terjadi penurunan tingkat kesehatan pada masyarakat.
3. Ketahanan Pangan rumah tangga selama pandemi, melalui hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengurangan konsumsi makanan pokok dan pemenuhan makanan seimbang, hal ini disebabkan dampak

dari covid-19 yaitu penurunan pendapatan rumah tangga sehingga untuk mempertahankan daya beli dalam pemenuhan kebutuhan harus melakukan pengurangan konsumsi pangan. Pangan yang cenderung berubah ini juga menyebabkan adanya penurunan kesehatan yang dialami masyarakat akibat tidak terpenuhinya gizi yang dialami beberapa masyarakat.

4. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada ketahanan pangan rumah tangga di Desa Simpang Empat dilihat dari Situasi pangan dan gizi menyimpulkan bahwa ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein secara kuantitas menunjukkan keadaan lebih dari cukup dan sarana dan prasarana ketahanan pangan sudah mendukung dilihat dari aktivitas ekonomi masyarakat di desa Simpang Empat. Namun tingkat ekonomi masyarakat rumah tangga yang masih dibawah rata-rata menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Hal ini juga dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sebagai pemasukan pendapatan rumah tangganya. Selama pandemi covid-19 ketahanan pangan masyarakat memiliki penurunan,hal ini terlihat dari pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga, dimana masyarakat mengurangi konsumsi makanan pokok,sementara sebelum pandemi Covid-19 masyarakat tidak pernah mengurangi konsumsi makanan pokok rumah tangga. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat kesehatan akibat gizi yang kurang . Sehingga penerapan bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan kepada masyarakat di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan membantu masyarakat akan tetapi tidak dapat

mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga, hal ini dikarenakan jumlah dana bantuan yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan daya beli rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam mewujudkan rumah tangga tanpa kelaparan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sangat membantu masyarakat, artinya saat masyarakat terdampak pandemi covid-19 dengan adanya bantuan tsb menyelamatkan rumah tangga dari kelaparan, akan tetapi melihat banyaknya penerima bantuan dengan usia lansia bantuan langsung tunai dana desa tidak berpengaruh dalam mengurangi gizi kronis.

## **5.2 Saran**

1. Perlu melakukan sosialisasi mengenai adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui adanya bantuan tersebut serta kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut. Karena penerima bantuan langsung tunai di Desa Simpang Empat hanya melalui Kepala Dusun.
2. Melihat adanya kontribusi penambahan pendapatan rumah tangga penerima Bantuan langsung Tunai Dana Desa di Desa Simpang Empat terdapat beberapa masyarakat yang memiliki penambahan pendapatan dari anggota keluarga lainnya, artinya masyarakat penerima bantuan masih memiliki pendapatan untuk membeli makanan pokok dalam mempertahankan ketahanan pangan. Sebaiknya pemerintah desa memberikan kepada masyarakat miskin terdampak covid-19 yang tidak memiliki penambahan pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, I. S. (2020). *Ketahanan Pangan Keluarga Di Masa Pandemi COVID 19. Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia.*
- Aziz, N. L. (2016). *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik*, 193-211.
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), 2020
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (BPS), 2020
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan Dalam angka ,2020
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Boediono, 1999:81 , *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, seri Sinopsis, Edisi Pertama, Cetakan Pertama BPFE, Yogyakarta
- B.F. Pasaribu, Rownlad. (2012). *Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan*. Depok: Universitas Gundarma.
- Deiningner, K., & Pedro, O. (2000). *Asset Distribution, Inequality, and Growth*. The World Bank, 5-9.
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Presa
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Dana Desa Tahun 2015 - 2018*. <http://www.kemenkeu.go.id>.
- Kementerian keuangan republik indonesia (2020) *Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial Penanganan Dampak Covid-19 Tahun 2020*

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015).
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan*. (Edisi Pertama). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2015). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N.Gregory. 2007. *Makroekonomi*, Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga
- Sukirno, Sadono, 2000. *Makro Ekonomika Modern*, PT. Rasa Grafindo Persada :Jakarta
- Sadono, Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar: Gemilang
- Todaro, Michael P. 2003. “*Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*”. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I Edisi

Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta  
Yuliana,2020”*Corona Virus disiaes*”:Wellnes Journalpress, Vol 2, No 1

## LAMPIRAN

### **KUESIONER ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA KETAHANAN PANGAN DI ERA PANDEMI** (studi kasus Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)

#### **Yang Terhormat**

Bapak/ Ibu Responden saya Novita Sari Br Sinulingga Mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sedang melakukan analisis mengenai “**ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA KETAHANAN PANGAN DI ERA PANDEMI** (studi kasus Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)”. Kuesioner ini hanya bagian dari penelitian yang saya lakukan, untuk menyelesaikan skripsi. Bapak/Ibu yang menjadi responden saya berharap partisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian ini dan memberikan jawaban yang sebenarnya. Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Responden atas ketersediaan dan partisipasinya dalam penelitian ini.

#### **I. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nomor Responden :
2. Nama Responden :
3. Jenis Kelamin : a. Laki-laki  
b. Perempuan
4. Usia :
5. Pendidikan Terakhir :  
a. Tidak/Belum  
b. SD/Sederajat  
c. SMP/Sederajat  
d. SMA/Sederajat  
e. Perguruan Tinggi
6. Jenis Pekerjaan :  
a. Wiraswasta  
b. Buruh  
c. Petani/Nelayan  
d. Lainnya (sebutkan)
7. Rata-rata Penghasilan (1 bulan) :

- a.  $\leq$  Rp.1.000.000,00
  - b. Rp.1.000.000,00 – Rp.3.000.000,00
  - c. Rp.3.000.000 – Rp.5.000.000,00
  - d.  $\geq$  Rp.5.000.000,00
- 8.** Kontribusi Anggota Keluarga terhadap pendapatan :
- a. tidak ada
  - b. satu – dua anggota keluarga
  - c. dua – 5 anggota keluarga
  - d. Lainnya (sebutkan)
- 9.** Selama pandemi apakah ada penurunan pendapatan anda :
- a. Ya
  - b. Tidak
- 10.** jika Ya,sebutkan alasannya
- a. PHK
  - b. Pemotongan Gaji
  - c. Penurunan Penjualan
  - d. Lainnya (sebutkan)
- 11.** berapakah jumlah pengeluaran Rumah Tangga Anda Perbulan
- a.  $\leq$  Rp.1.000.000,00
  - b. Rp.1.000.000,00 – Rp.3.000.000,00
  - c. Rp.3.000.000 – Rp.5.000.000,00
  - d.  $\geq$  Rp.5.000.000,00
- 12.** Status Kepemilikan Rumah :
- a. Milik Sendiri/ Warisan Keluarga
  - b. Sewa
  - c. KPR (kredit pemilikan rumah)
  - d. lainnya (sebutkan)
- 13.** Apakah anda memiliki jaminan kesehatan :
- a. YA
  - b. TIDAK
- 14.** Jika ya,jaminan kesehatan apa yang anda miliki :
- a. BPJS
  - b. KIS
  - c. JKN
  - d. Lainnya (sebutkan)
- 15.** Sumber Penerangan
- a. Listrik
  - b. Bukan Listrik
- 16.** Sumber Air Minum
- a. sumur tidak terlindungi
  - b. sumur terlindungi
  - c. air kemasan/isi ulang
  - d. sungai

17. apakah anda memiliki lahan bertani/berkebun

- a. YA
- b. TIDAK

18. jenis makanan pokok yang dikonsumsi

- a. beras
- b. Non Beras (ubi,jagung,tepung terigu,dll)
- c. Lainnya (sebutkan)

19. Darimana anda memperoleh makanan pokok

- a. Beli
- b. Hasil Panen Sendiri
- c. Pemerintah (bantuan)
- d. Lainnya (Sebutkan)

## **II. STATUS KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA**

1. Selama Pandemi Covid-19 seberapa sering anda mengurangi makan makanan pokok dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19

- a. Tidak pernah
- b. pernah
- c. sering
- d. terkadang

2. selama pandemi covid-19,berapakah anda membeli daging/ayam/susu untuk dikonsumsi (perbulan)

- a. Tidak pernah
- b. pernah
- c. sering
- d. terkadang

3. sebelum pandemi covid-19,berapakah anda membeli daging/ayam/susu untuk dikonsumsi (perbulan)

- a. Tidak pernah
- b. pernah
- c. sering
- d. terkadang

4. Selama Pandemi Covid-19 anda tidak mampu membeli makanan seimbang

- a. Tidak pernah
- b. pernah
- c. sering
- d. terkadang

5. sebelum Pandemi Covid seberapa sering anda membeli makanan seimbang

- a. Tidak pernah
- b. pernah
- c. sering

d. terkadang  
 6. Penurunan kesehatan/ sering sakit akibat tidak terpenuhinya gizi yang baik

- a. Tidak pernah
- b. pernah
- c. sering
- d. terkadang

**III. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA**

1. Darimana anda mendapatkan informasi mengenai Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa :

- a. Pemerintah (kabupaten,kecamatan,desa)
- b. Media
- c. Pemandu/Relawan BLT Dana Desa
- d. Lainnya (sebutkan)

2. Sebelumnya pernahkah anda menerima bantuan dari pemerintah selain BLT Dana

Desa :

- a. Ya
- b. Tidak

3. Jika Ya, bantuan apa yang anda terima :

- a. Pkh
- b. BPNT
- c. Kartu Prakerja
- d. Lainnya (sebutkan)

4. Darimana anda mengetahui cara mendaftar untuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa :

- a. Media Sosial
- b. Relawan BLT Dana Desa
- c. Orang Lain
- d. Lainnya (sebutkan)

**Keterangan untuk skala penilaian :**

**STS : Sangat Tidak Setuju**

**TS : Tidak Setuju**

**S : Setuju**

**SS : Sangat Setuju**

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS

1.	Saya mengetahui adanya program BLT Dana Desa				
2.	Saya mengetahui secara jelas mengenai prosedur mengikuti/mendapatkan BLT Dana Desa				
3.	Proses pendaftaran BLT Dana Desa sulit dilaksanakan				
4.	Saya memperoleh sosialisasi dengan baik mengenai Program BLT Dana Desa				
5.	Saya memperoleh pengarahan atau koordinasi dengan baik dari pemandu/relawan BLT Dana Desa				
6.	Pemandu BLT Dana Desa memberikan pelayanan yang baik ketika melakukan pembagian bantuan				

#### IV. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA

**Keterangan untuk skala penilaian :**

**STS : Sangat Tidak Setuju**

**TS : Tidak Setuju**

**S : Setuju**

**SS : Sangat Setuju**

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Membantu rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan pangan				
2.	Mewujudkan rumah tangga tanpa kelaparan				
3.	Menghindari kekurangan gizi kronis				
4.	Melakukan <i>urbanfarming</i> atau pemanfaatan lahan untuk bertani/berkebun sebagai cadangan makanan keluarga sendiri				
5.	Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan yang bernutrisi				



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-4624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 171/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/16/2/2021

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 16/2/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Novita Sari Br Sinulingga  
NPM : 1705180002  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Riset

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Dampak kebijakan tranfer payment masa sebelum Dan sesudah Covid

Rencana Judul : 1. Dampak kebijakan tranfer payment masa sebelum Dan sesudah Covid di kec simpang empat asahan  
2. Analisis Efisiensi Industri Kecil Menengah  
3. STRATEGI MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN EKONOMI RUMAH TANGGA PETANI

Objek/Lokasi Penelitian : Kec.Simpang Empat Asahan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

  
(Novita Sari Br Sinulingga)



**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 171/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/16/2/2021

Nama Mahasiswa : Novita Sari Br Sinulingga  
NPM : 1705180002  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Riset  
Tanggal Pengajuan Judul : 16/2/2021  
Nama Dosen pembimbing\*) : ROSWITA HARANI  
Judul\*\*) : Analisis Dampak kebijakan Transfer  
perantara sebelum dan sesudah (studi  
kasus program Bantuan Langsung Tunai  
Kecamatan Sempang Empat)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan  
  
(Dr. Pradiya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 24 Februari 2020  
Dosen Pembimbing  
  
Dra. Roswita Harani, M.Si.

Keterangan:  
\*) Disi oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Disi oleh Dosen Pembimbing  
Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan upload ke sistem 16-2 via pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

Pada hari ini Jum'at 07 Mei 2021 telah dilaksanakan seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

**Nama** : Novita Sari Br Sinulingga  
**N.P.M.** : 1705180002  
**Tempat / Tgl.Lahir** : Jakarta, 29 November 1998  
**Alamat Rumah** : Jalan Bilal Gg Setro, Medan  
**Judul/Proposal** : Analisis Dampak Kebijakan Transfer Payment Sebelum Dan Sesudah Covid (Studi Kasus Program Bantuan Langsung Tunai Kecamatan Simpang Empat)

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	Analisis Evaluasi kebijakan bantuan langsung Tunai Desa Desa Pada Ketahanan pangan di Era pandemi (Studi Kasus Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Arakan - Provinsi Sumatera Utara)
Bab I	Memperbaiki latar belakang
Bab II	Memperbaiki Teori
Bab III	Teknik sampling & Teknik Analisis Data
Lainnya	
kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Jum'at, 07 Mei 2021

**TIM SEMINAR**

Ketug  
  
Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Sekretaris  
  
Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing  
  
Dra.Hj. Roswita Hafni, M.Si

Pembanding  
  
Dr. Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari *Jum'at, 07 Mei 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Novita Sari Br Sinulingga  
N.P.M. : 1705180002  
Tempat / Tgl.Lahir : Jakarta, 29 November 1998  
Alamat Rumah : Jalan Bilal Gg Setro, Medan  
JudulProposal : Analisis Dampak Kebijakan Transfer Payment Sebelum Dan Sesudah Covid (Studi Kasus Program Bantuan Langsung Tunai Kecamatan Simpang Empat)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dra.Hj. Roswita Hafni, M.Si*

Medan, Novita Sari Br Sinulingga

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj. Roswita Hafni, M.Si

Pembanding

Dr. Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Diketahui / Disetujui

A.n. Dekan  
Wakil Dekan - I



*ADE GUNAWAN*  
Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NOVITA SARI BR SINULINGGA  
N.P.M : 1705180002  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Alamat Rumah : Jl. BILAL NO. 34 MEDAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA KETAHANAN PANGAN DI ERA PANDEMI (STUDI KASUS DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
13/8-2021	Revisi proposal dan pembuat kuesioner → ACE		
15/8-2021	- Sebar kuesioner ke desa. + perbates bab III		
21/8-2021	- Rumus tertumpuk. data data. - lengkapi data sekunder		
25/8-2021	Bimbingan bab I s.d 4		
28/8-2021	- Perbates parafesis kuesioner dan data sekunder. - Lengkapi Daftar Isi, prostaes.		
6/9-2021	Perbates bab I, II, III, IV, v, dan bab VI		
8/9-2021	ACE sidang skripsi		

Medan, 8 September 2021

Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email : [rector@umsu.ac.id](mailto:rector@umsu.ac.id)

Nomor : 2074 /IL.3-AU/UMSU-05/ F / 2021  
Lampiran :  
Perihal : **IZIN RISET PENDAHULUAN**

Medan, 01 Shafar 1443 H  
08 September 2021 M

Kepada Yth.  
Bapak / Ibu Pimpinan  
Kantor Desa Simpang Empat  
Jln.Desasimpang Empat Kab.Asahan  
Di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program **Studi Strata Satu ( S-1 )**

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Novita Sari Br.Sinulingga  
Npm : 1705180002  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul : Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (studi kasus desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb



Dekan

H. JANURI, SE.,MM.,M.Si.

**Tembusan :**

1. Pertinggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rector@umsu.ac.id](mailto:rector@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 2074 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2021**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :  
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**  
Pada Tanggal : **08 September 2021**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Novita Sari Br.Sinulingga**  
N P M : **1705180002**  
Semester : **VIII (Delapan)**  
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  
Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (studi kasus desa Simpang  
Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Provinsi  
Sumatera Utara)**

Dosen Pembimbing : **Drs.Hj.Roswita Hafni,M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 07 September 2022**
4. Revisi Judul.....

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 01 Shafar 1443 H  
08 September 2021 M



Dekan

**H. JANURI, SE.,MM.,M.Si.**

Tembusan :  
1. Pertiagal